



Kementerian Pertanian

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Perkebunan

2025-2029



© 2026

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Perkebunan

2025-2029



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Perkebunan
2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO.3, GEDUNG C PASAR
MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON(021) 7815380- 4, FAKSIMILI(021)7815486-7815586
WEBSITE:<http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR : 06/Kpts./RC.020/E/01/2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repttblik Indonesia Nomof 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16.6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);



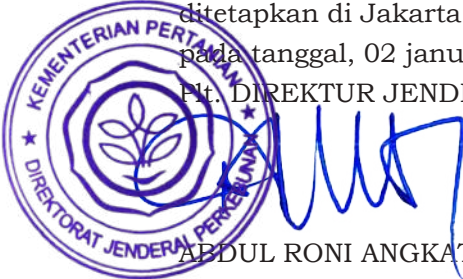
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2025-2029.



- KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 02 Januari 2026
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

ABDUL RONI ANGKAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Gubernur di Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Perkebunan di seluruh Indonesia.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025–2029* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 mengusung tema pembangunan

**“Bersama Indonesia Maju,
Menuju Indonesia Emas 2045”**,

yang sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional periode 2025–2029. Visi tersebut diwujudkan melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan **Asta Cita** sebagai Prioritas Pembangunan Nasional.

Dalam mewujudkan visi Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yaitu “Pertanian Maju Berkelanjutan Serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Direktorat Jenderal Perkebunan melalui visi “Perkebunan Bernilai Tambah, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut, berkontribusi pada dua Prioritas Nasional, yaitu: (1) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; serta (2) melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kontribusi tersebut diwujudkan secara konkret melalui dukungan terhadap Program Prioritas “Nilai Tambah dan Daya Saing Industri” dan “Dukungan Manajemen”.



Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan, pedoman, dan acuan umum arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan ke depan. Renstra ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Arah kebijakan tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditetapkan secara lebih konkret, terukur, tepat sasaran, berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan pemikiran dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan ini.

Jakarta, Januari 2026
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan



Abdul Roni Angkat
NIP. 19780727 200501 1 001





DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR : 06/Kpts./RC.020/E/01/2026	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.1.1. Produk Domestik Bruto Perkebunan	3
1.1.2. NTP dan NTUP Perkebunan	5
1.1.3. Kinerja Ekspor Perkebunan.....	5
1.1.4. Tenaga Kerja Perkebunan.....	8
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
1.1.1. Potensi Subsektor Perkebunan.....	10
1.1.2. Permasalahan subsektor perkebunan	16
1.3 Capaian Direktorat Jenderal Perkebunan	22
BAB II. VISI MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	36
2.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan.....	36
2.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan	38
2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.....	41
2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan.....	43
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	54
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	54
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian.....	55
3.3. Arah kebijakan dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan	58



3.4. Kerangka Regulasi	64
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	66
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	72
4.1. Target Kinerja Ditjen Perkebunan.....	72
4.2. Kerangka Pendanaan Ditjen. Perkebunan.....	76
BAB V. PENUTUP	78
Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Ditjen. Perkebunan 2025-2029...	80
Lampiran 2. Manajemen Risiko.....	109
Lampiran 3. Kerangka Regulasi.....	132
Lampiran 4. Pohon Kinerja.....	137





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kontribusi PDB Per Sub Sektor Pertanian Terhadap Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4
Gambar 2.	Perkembangan NTP dan NTUP Perkebunan 2020-2024.....	5
Gambar 3.	Perkembangan Kinerja Ekspor Subsektor Perkebunan.....	6
Gambar 4.	Kontribusi Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2024	7
Gambar 5.	Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2023-2024.....	8
Gambar 6.	Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)	9
Gambar 7.	Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa).....	10
Gambar 8.	Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024	23
Gambar 9.	Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan 2020-2024.....	25
Gambar 10.	Capaian Kinerja Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan 2020-2024	27
Gambar 11.	Capaian Kinerja Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI 2020-2024.....	28
Gambar 12.	Capaian Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2023	30
Gambar 13.	Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023.....	32
Gambar 14.	Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029	56
Gambar 15.	Kerangka Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029	59
Gambar 16.	Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan	68





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDB Nasional.....	33
Tabel 2. Nilai Ekspor Sektor Pertanian Tahun 2020-2024.....	6
Tabel 3. Peluang dan Tantangan berdasarkan Kategori.....	21
Tabel 4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.....	44
Tabel 5. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen. Perkebunan Tahun 2025-2029.....	46
Tabel 6. Permasalahan terkait SOTK dan Desain Kriteria Ditjen Perkebunan..	67
Tabel 7. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Program Ditjen. Perkebunan 2025-2029	73





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen. Bun) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perkebunan dalam periode lima tahun, yakni tahun 2025-2029. Renstra ini disusun sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mengalokasikan sumber daya serta melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara efektif, efisien dan terarah.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan dilatarbelakangi oleh kebutuhan dalam upaya memastikan tercapainya visi dan misi, serta tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Pertanian dalam bidang perkebunan yang mendukung pembangunan nasional.

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusi subsektor ini tercermin melalui penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penyediaan bahan baku bagi industri, pengembangan bioenergi, dan peningkatan ekspor. Selain itu, subsektor perkebunan juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Namun demikian, pembangunan subsektor perkebunan dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, fluktuasi harga komoditas, serta kebutuhan akan modernisasi teknologi dan peningkatan daya saing. Tantangan tersebut menuntut adanya perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global.

Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan disusun untuk mengarahkan pembangunan sektor perkebunan agar lebih produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan. Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan berfungsi



sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pertanian, serta target pembangunan nasional.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Produk Domestik Bruto Perkebunan

Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, didukung oleh luas wilayah geografis, iklim tropis, tingkat kesuburan tanah, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Kontribusi subsektor perkebunan tercermin dari perannya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi serta sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDB Nasional

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023 *
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,70%	13,28%	12,40%	12,53%
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10,20%	9,85%	9,22%	9,25%
• Tanaman Pangan	3,07%	2,60%	2,32%	2,26%
• Tanaman Hortikultura	1,62%	1,55%	1,44%	1,37%
• Tanaman Perkebunan	3,63%	3,94%	3,76%	3,88%
• Peternakan	1,69%	1,58%	1,52%	1,56%
• Jasa Pertanian dan Perburuan	0,20%	0,19%	0,18%	0,18%
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,70%	0,66%	0,60%	0,62%
c. Perikanan	2,79%	2,77%	2,58%	2,66%

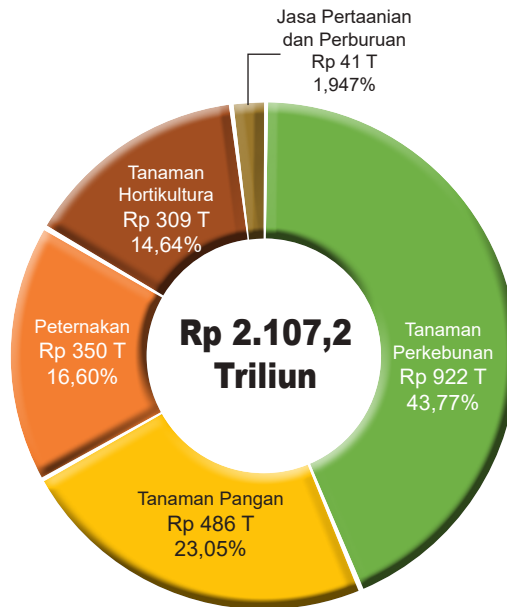
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Secara umum, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDB nasional pada tahun 2024 menurun 1,09% dibandingkan tahun 2020, namun meningkat 0,08% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, berdasarkan Tabel 1, subsektor perkebunan secara

konsisten memberikan kontribusi yang relatif lebih besar terhadap PDB nasional dibandingkan subsektor lainnya selama periode 2020-2024. Kontribusi subsektor perkebunan meningkat dari 3,63% pada tahun 2020 menjadi 4,17% pada tahun 2024. Capaian tersebut menegaskan peran penting subsektor perkebunan sebagai salah satu kontributor utama dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta dalam mendukung perekonomian nasional.



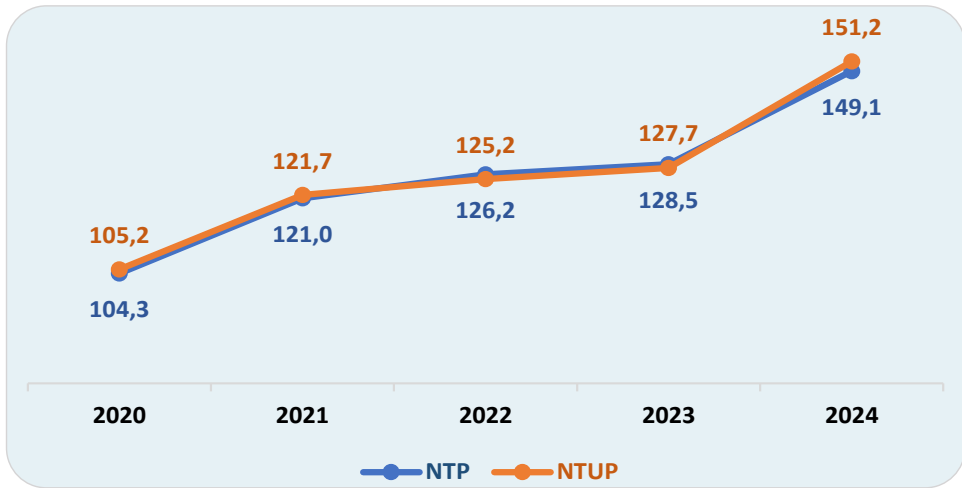
Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Gambar 1. Kontribusi PDB Per Sub Sektor Pertanian Terhadap Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian secara keseluruhan berkontribusi sebesar 9,52% (Rp2.107,2 Triliun) terhadap PDB nasional. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, dari sektor tersebut, subsektor perkebunan memberi kontribusi terbesar yaitu 43,77% (Rp922,2 triliun). Hal tersebut menunjukkan peran penting subsektor perkebunan dalam mendukung perekonomian nasional.



1.1.2 NTP dan NTUP Perkebunan



Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Gambar 2. Perkembangan NTP dan NTUP Perkebunan 2020-2024

Selama periode 2020–2024, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan meningkat secara konsisten dari angka 104,3 pada tahun 2020 menjadi 149,1 pada tahun 2024. Sejalan dengan perkembangan NTP, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor perkebunan juga menunjukkan tren peningkatan dari 105,2 pada tahun 2020 menjadi 151,2 pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 45,9 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual komoditas yang diterima petani relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan produksi pertanian dan konsumsi rumah tangga petani.

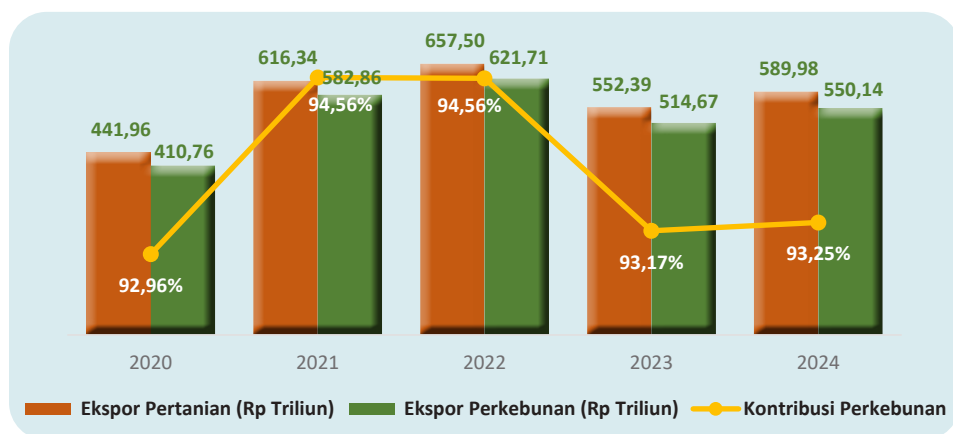
1.1.3 Kinerja Ekspor Perkebunan

Selama periode 2020-2024, kinerja ekspor sektor pertanian secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun disertai fluktuasi. Pada tahun 2024, nilai ekspor sektor pertanian tercatat sebesar Rp 589,9 Triliun, meningkat sebesar 33,49% dibandingkan dengan tahun 2020. Dari empat subsektor utama pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan), subsektor perkebunan secara konsisten memberikan kontribusi terbesar dan paling dominan terhadap total nilai ekspor sektor pertanian seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Ekspor Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

Subsektor Pertanian	Nilai Ekspor (Rp Triliun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan	3,62	4,65	3,56	4,46	3,36
Tanaman Hortikultura	9,49	10,15	10,92	12,25	15,03
Perkebunan	410,76	582,86	621,71	514,67	550,14
Peternakan	18,09	18,68	21,31	21,01	21,46
Pertanian	441,96	616,34	657,50	552,39	589,98

Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

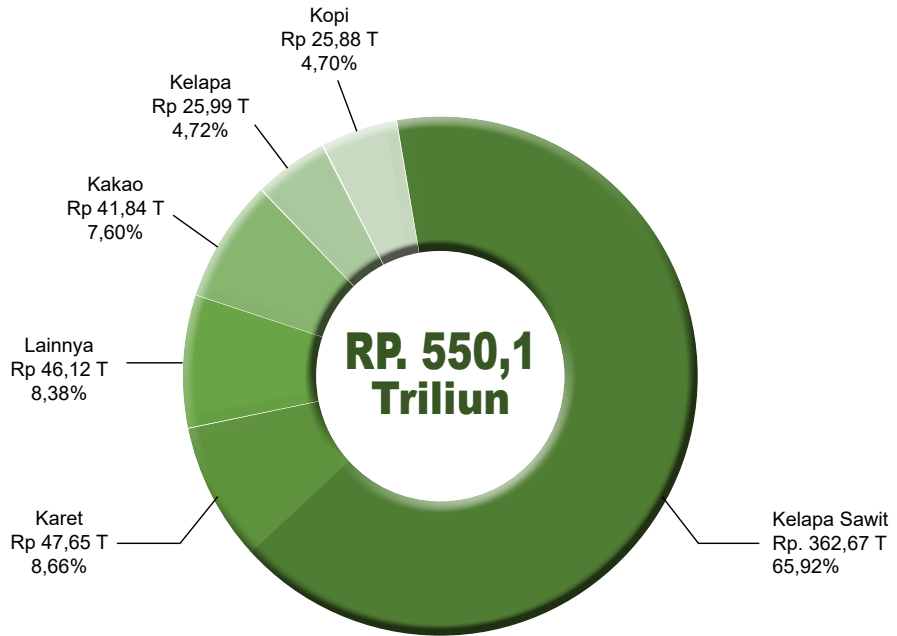


Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Gambar 3. Perkembangan Kinerja Ekspor Subsektor Perkebunan

Periode 2020-2024, kontribusi subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian secara rata-rata berada di atas 90%, dengan kontribusi tertinggi mencapai 94,56% pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, kinerja ekspor subsektor perkebunan kembali meningkat pada tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai ekspor komoditas perkebunan mencapai Rp550,14 Triliun, meningkat sebesar 6,89% dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi ini menegaskan peran dominan subsektor perkebunan sebagai kontributor utama ekspor sektor pertanian.





Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Gambar 4. Kontribusi Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2024

Kontribusi besar subsektor perkebunan tersebut terutama berasal dari komoditas kelapa sawit. Pada Gambar 4, kelapa sawit mendominasi subsektor perkebunan dengan kontribusi sebesar 65,92% (Rp362,67 Triliun). Komoditas perkebunan utama lainnya meliputi karet, kelapa, kopi, dan kakao turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor subsektor perkebunan. Secara keseluruhan, nilai ekspor komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao pada tahun 2024 berkontribusi sebesar 91,62% (Rp504,02 Triliun).

Neraca perdagangan perkebunan naik sebesar 3,50% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai total Rp428,7 triliun pada tahun 2024. Meskipun neraca perdagangan kelapa sawit mengalami penurunan 7,06%, kelapa sawit tetap mendominasi neraca perdagangan perkebunan dengan kontribusi 84,57% atau sebesar Rp362,5 triliun pada tahun 2024.



Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

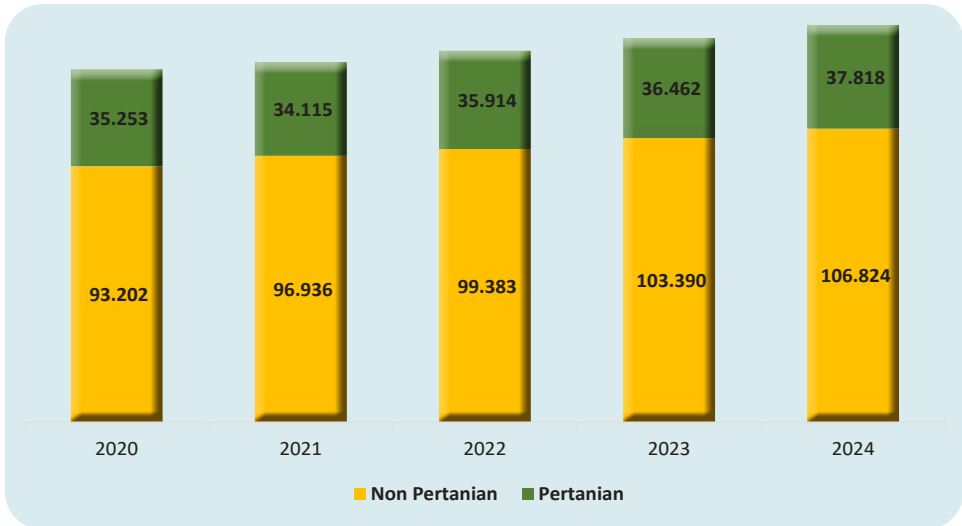
Gambar 5. Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2023-2024

Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan utama lainnya meliputi karet, kelapa, kopi, dan kakao turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perdagangan subsektor perkebunan yang mencerminkan dominasi komoditas-komoditas tersebut dalam struktur perekonomian nasional.

1.1.4 Tenaga Kerja Perkebunan

Sektor pertanian tidak hanya memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Sektor pertanian menjadi salah satu kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024, sektor Pertanian mampu menyerap sekitar 26,15% atau sekitar 37,8 juta tenaga kerja.



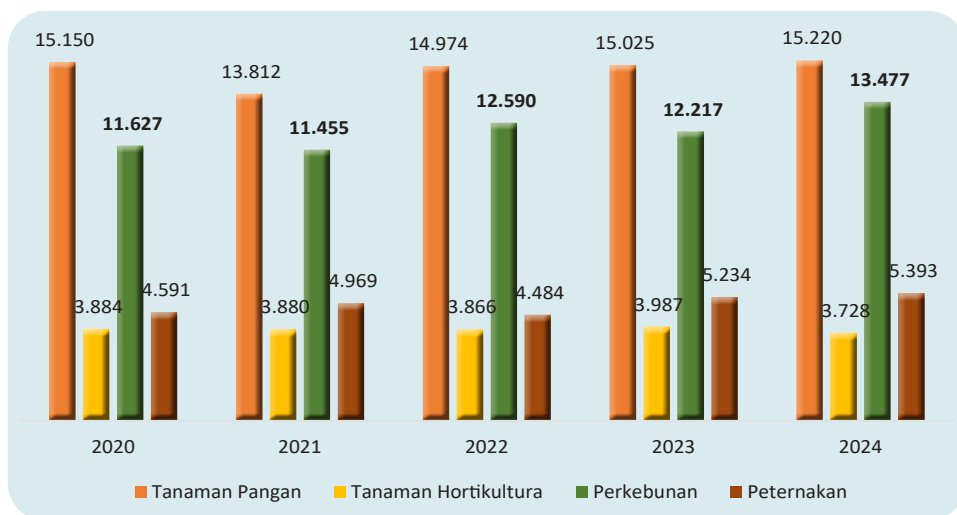


Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Gambar 6. Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2020-2024 (Ribuan Jiwa)

Apabila ditinjau lebih lanjut, selama periode 2020-2024, sektor pertanian menunjukkan tren jumlah pekerja yang cenderung meningkat meskipun dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 35,2 juta jiwa dan meningkat sebesar 7,28% menjadi 37,8 juta tenaga kerja pada tahun 2024.

Sedangkan pada subsektor, terjadi fluktuasi perkembangan jumlah tenaga kerja selama periode tahun 2020-2024. Hal tersebut juga terjadi pada subsektor perkebunan, meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke 2024 sebesar 15,91%.



Sumber: Pusdatin Kementan, diolah Ditjenbun

Gambar 7. Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)

Sebagai salah satu subsektor yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, subsektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 35,64% atau sebesar 13,4 juta jiwa pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan bahwa subsektor perkebunan memiliki peran yang signifikan dalam struktur ketenagakerjaan sektor pertanian.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan subsektor perkebunan pada periode 2025–2029 dihadapkan pada berbagai potensi dan permasalahan yang semakin dinamis seiring dengan perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.

1.1.1 Potensi Subsektor Perkebunan

1. Pemenuhan Permintaan Pasar dan Kebutuhan Konsumen

Permintaan pasar terhadap produk-produk perkebunan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Kondisi daya beli masyarakat global yang semakin membaik membuka peluang peningkatan permintaan terhadap minyak sawit, kakao, karet, teh, dan rempah-rempah.



Produk-produk ini dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi langsung, tetapi juga sebagai bahan baku industri makanan, kosmetik, farmasi, dan energi terbarukan. Oleh karena itu, sektor perkebunan diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi dan menjaga kontinuitas pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar global secara berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat global terhadap isu keamanan pangan, mutu produk, lingkungan serta keberlanjutan semakin meningkat, sehingga konsumen kini lebih selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Produk-produk yang diproduksi dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, bebas dari bahan kimia berbahaya, serta memiliki sertifikasi keberlanjutan menjadi semakin diminati. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mendorong praktik perkebunan berkelanjutan dan memastikan ketelusuran produk (*traceability*) sebagai bagian dari standar ekspor.

Diversifikasi produk perkebunan menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk menjawab permintaan pasar dan konsumen yang semakin kompleks dan beragam. Pengembangan produk bernilai tambah tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperluas segmen pasar.

Modernisasi rantai distribusi berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan melalui pemendekan rantai pasok, peningkatan efisiensi logistik, dan pengurangan kehilangan pascapanen. Penerapan sistem *cold chain*, pusat distribusi terpadu, serta transportasi yang terkoordinasi dapat menjaga mutu, stabilitas kualitas, dan umur simpan produk, sekaligus meningkatkan margin usaha dan akses pasar. Pemerintah mendorong penguatan konektivitas langsung antara petani dan pasar akhir melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, kemitraan dengan *offtaker*, serta pembangunan infrastruktur logistik pertanian. Keberhasilan strategi ini memerlukan dukungan lintas sektor dan penguatan kapasitas petani, sehingga dalam jangka panjang mampu membangun sistem agribisnis perkebunan yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2. Penerapan Teknologi di Sektor Pertanian

Penerapan teknologi modern seperti *Internet of Things* (IoT), drone, dan sistem pertanian presisi mulai menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan efisiensi dan produktivitas sektor perkebunan di Indonesia. Penerapan teknologi modern dapat dimanfaatkan dalam pemantauan kondisi lahan, tanaman, dan lingkungan secara *real-time* melalui sensor dan perangkat otomatis. Integrasi ketiga teknologi ini berkontribusi pada transformasi digital sektor perkebunan hulu, memastikan jaminan pemasaran hasil perkebunan untuk industri pengolahan dan ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global. Selain itu, teknologi ini juga sejalan dengan tren pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan yang semakin menjadi tuntutan pasar internasional. Dalam jangka panjang, penerapan teknologi digital dan presisi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama komoditas perkebunan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan konsumen global.

Seiring dengan penerapan teknologi modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah pemasaran dan perdagangan produk perkebunan di tingkat nasional dan internasional.

Digitalisasi proses perdagangan memberikan peluang besar bagi petani, pelaku usaha kecil menengah (UKM), serta perusahaan besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara lebih efisien dan transparan. Selain itu, TIK memungkinkan penyediaan informasi harga pasar, tren permintaan, dan preferensi konsumen secara *real-time*, sehingga pelaku usaha dapat menyusun strategi produksi dan pemasaran yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Pengembangan ekosistem digital oleh pemerintah dan swasta, melalui *e-commerce* pertanian, logistik digital, sertifikasi elektronik, serta penerapan *blockchain* dan sistem ketertelusuran digital, mempercepat transaksi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan konsumen, khususnya untuk pasar ekspor berstandar tinggi. Pemanfaatan TIK ini meningkatkan daya saing produk perkebunan sekaligus memperkuat keterhubungan petani



dengan pasar akhir, sehingga mendorong transformasi subsektor perkebunan menjadi lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pasar dan teknologi

3. Lingkungan Hidup

Pengembangan subsektor perkebunan harus memperhatikan pengendalian dampak lingkungan melalui penerapan praktik budidaya berkelanjutan, termasuk pendekatan budidaya regeneratif yang menjaga kualitas tanah dan air, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekologi. Praktik ini berkontribusi pada peningkatan serapan karbon, retensi air tanah, pencegahan degradasi lahan, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi persyaratan dasar dalam perizinan usaha dan sekaligus bagian dari pembuktian keberlanjutan yang semakin dipersyaratkan dalam perdagangan internasional.

Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu aksi strategis dalam peningkatan produksi, keberlanjutan dan daya saing produk perkebunan Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial, mendorong negara tujuan ekspor mensyaratkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan. Sertifikasi seperti Indonesian *Sustainable Palm Oil* (ISPO), *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *Rainforest Alliance*, organik, dan *Fair Trade* menjadi instrumen penting untuk menjaga akses pasar, khususnya di kawasan Uni Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur. Pemerintah Indonesia telah menetapkan ISPO sebagai standar keberlanjutan kelapa sawit yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk legalitas lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi.

Sejalan dengan meningkatnya dukungan dan preferensi pasar global terhadap produk hijau, subsektor perkebunan mengembangkan desa organik perlindungan tanaman ramah lingkungan memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, pemanfaatan agens hayati dan musuh alami OPT sebagai bagian dari strategi perlindungan tanaman jangka panjang tidak

hanya menekan ketergantungan pada pestisida kimia, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sistem produksi perkebunan secara ekologis dan ekonomis.

Penerapan teknologi pengelolaan lingkungan, seperti pengolahan limbah terpadu, konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan energi terbarukan, berperan dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Pemanfaatan limbah perkebunan menjadi pupuk organik, biogas, atau biopellet, serta penggunaan teknologi pemantauan berbasis digital mendukung peningkatan produktivitas sekaligus pemenuhan standar lingkungan global dalam rantai pasok.

Subsektor perkebunan juga memiliki potensi besar dalam pengembangan bioenergi sebagai bagian dari transisi energi dan ekonomi hijau. Komoditas seperti kelapa sawit, tebu, aren, kemiri sunan, dan jarak pagar berpotensi dikembangkan sebagai sumber biodiesel dan bioetanol. Pengembangan biofuel tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi karbon, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperluas pasar, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dukungan kebijakan yang konsisten, investasi teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor perkebunan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi energi berkelanjutan di Indonesia.

4. Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah terus memperkuat kontribusi subsektor perkebunan melalui kebijakan dan program strategis yang berorientasi pada keberlanjutan, inklusivitas, dan peningkatan daya saing. Fokus pengembangan diarahkan pada komoditas perkebunan strategis yang berperan penting sebagai sumber devisa, penggerak ekonomi perdesaan, dan sumber penghidupan petani. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, sertifikasi, hilirisasi, penguatan riset, infrastruktur, serta kelembagaan petani agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Pemerintah mendorong pelaksanaan Reformasi Agraria di sektor perkebunan melalui legalisasi dan redistribusi tanah, penataan akses usaha, serta penyelesaian status lahan perkebunan rakyat di kawasan hutan. Selain itu, program ini diperkuat dengan penataan akses berupa dukungan usaha, pelatihan, pembiayaan, keamanan investasi, dan integrasi dengan rantai nilai komoditas perkebunan. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketimpangan struktural dan konflik dalam penguasaan lahan, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kepastian lahan masyarakat juga tidak lepas dari permasalahan status kawasan hutan yang dialami perkebunan rakyat, terkhusus komoditas kelapa sawit yang didera kampanye deforestasi. Penyelesaian pelepasan status kawasan hutan perlu koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dirumuskan dalam kebijakan dan regulasi yang mempertimbangkan asas keadilan, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, keterbukaan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung pengembangan komoditas perkebunan.

Pemerintah juga turut serta dalam mendukung program energi hijau, salah satu strategi utamanya yaitu pengembangan bioenergi berbasis komoditas perkebunan. Program ini tidak hanya mendukung kebijakan transisi energi nasional melalui bauran energi terbarukan, tetapi juga membuka pasar baru, memperluas hilirisasi, dan meningkatkan nilai tambah produk perkebunan secara signifikan.

5. Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Peningkatan produktivitas subsektor perkebunan dapat didorong melalui pemanfaatan lahan suboptimal dan hutan rusak secara produktif dan berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan tanaman pangan dan energi alternatif berbasis agroforestri dan sistem tumpang sari. Komoditas seperti aren, ubi kayu, sagu, sorgum, dan kelapa berpotensi meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi ruang, diversifikasi pendapatan petani, dan peningkatan produktivitas lahan secara ekologis tanpa konversi hutan primer atau lahan gambut.

Produksi dan produktivitas tanaman dipengaruhi oleh faktor pembatas baik dari sisi teknis budidaya maupun diluar teknis. Perbaikan kultur teknis (intensifikasi) diyakini menjadi kunci keberhasilan perkebunan Indonesia, terutama perkebunan rakyat (PR), untuk memperbaiki produktivitas yang terus menurun. Intensifikasi merupakan usaha meningkatkan produksi dan produktivitas melalui peningkatan kualitas teknis dengan pemberian input sarana produksi sesuai kebutuhan. Selain intensifikasi peningkatan produksi juga dapat dilakukan melalui ekstensifikasi. Ekstensifikasi dapat meningkatkan produksi dengan didukung ketersediaan benih unggul bermutu dan berkelanjutan, penerapan teknik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta dampak perubahan iklim (DPI).

1.1.2 Permasalahan Subsektor Perkebunan

1. Pemenuhan Permintaan Pasar dan Kebutuhan Konsumen

Subsektor perkebunan nasional menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan pasar global akibat fluktuasi harga internasional yang dipengaruhi dinamika geopolitik, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan, sehingga berdampak pada pendapatan petani serta ketidakpastian investasi. Selain itu, masih terjadi penolakan produk ekspor akibat ketidaksesuaian terhadap standar mutu, keamanan pangan, ketertelusuran, dan sertifikasi lingkungan yang semakin ketat di negara tujuan. Keterbatasan penerapan praktik budidaya dan penanganan yang baik, fasilitas pengujian mutu, serta pengawasan kualitas menyebabkan sebagian produk belum mampu memenuhi persyaratan pasar.

Permasalahan lain mencakup ketidakstabilan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan akibat pengaruh iklim, umur tanaman, serangan OPT, keterbatasan sarana produksi, dan penerapan teknologi yang belum optimal. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur dan investasi logistik yang berdampak pada tingginya biaya distribusi, kehilangan pascapanen, dan lemahnya konsolidasi produk petani. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan terintegrasi yang mendorong peningkatan mutu,



modernisasi budidaya dan pascapanen, penguatan sistem sertifikasi dan logistik, serta diversifikasi pasar ekspor guna memperkuat daya saing produk perkebunan Indonesia.

2. Penerapan teknologi di sektor pertanian

Salah satu tantangan krusial dalam pengembangan subsektor perkebunan di Indonesia adalah tingginya biaya adopsi teknologi, terutama bagi petani kecil yang merupakan pelaku utama dalam sistem produksi. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat lahan perkebunan mayoritas dikelola oleh perkebunan rakyat, yang umumnya memiliki keterbatasan modal, akses informasi, dan kapasitas teknis.

Teknologi modern seperti irigasi presisi, pemupukan berbasis sensor, penggunaan drone untuk pemantauan dan penyemprotan lahan, *early warning system*, penginderaan jauh (*remote sensing*), *artificial intelligence* (AI) untuk deteksi penyakit tanaman dan sistem pertanian berbasis digital (*smart farming*) menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Namun, teknologi ini memerlukan investasi awal yang tidak sedikit, baik dalam bentuk alat, pelatihan, maupun infrastruktur pendukung. Selain itu, akses ke pembiayaan formal seperti kredit usaha tani juga masih terbatas, akibat kendala agunan, risiko usaha, dan literasi keuangan yang rendah. Akibatnya, sebagian besar petani masih mengandalkan praktik tradisional yang meskipun murah, namun kurang efisien dan sulit bersaing di pasar yang menuntut kualitas tinggi serta keberlanjutan.

Dominasi perkebunan rakyat dalam struktur produksi nasional juga berarti bahwa tantangan ini tidak bersifat individual, tetapi sistemik, dan berdampak langsung terhadap produktivitas perkebunan nasional, efisiensi rantai pasok, serta daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar global. Apabila tidak ditangani secara strategis, kesenjangan teknologi ini akan semakin melebar antara petani kecil dan pelaku usaha besar, sehingga memperkuat ketimpangan dalam sektor pertanian.

3. Lingkungan hidup

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrem. Perubahan pola musim, peningkatan suhu, ketidakpastian curah hujan, serta meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem seperti kekeringan dan banjir berdampak pada penurunan produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha perkebunan. Kondisi tersebut mempengaruhi kinerja komoditas perkebunan strategis. Di sisi lain, kapasitas adaptif petani kecil masih terbatas, terutama dalam akses terhadap informasi iklim, pemanfaatan teknologi adaptasi, serta ketersediaan sistem peringatan dini. Selain berdampak pada produksi, perubahan iklim juga meningkatkan tekanan global terhadap tata kelola lingkungan sektor perkebunan, khususnya terkait emisi gas rumah kaca dan kehilangan cadangan karbon akibat konversi hutan dan lahan gambut. Penerapan sertifikasi lingkungan dan praktik pertanian ramah iklim semakin menjadi persyaratan perdagangan internasional, sehingga menuntut dukungan kebijakan dan program konkret agar pekebun, terutama perkebunan rakyat, mampu memenuhi standar keberlanjutan tersebut.

Di sisi lain, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati masih menjadi permasalahan serius akibat praktik budidaya yang tidak berkelanjutan, penggunaan input kimia berlebihan, pembukaan lahan yang tidak terkendali, dan sistem monokultur jangka panjang. Konversi hutan untuk pengembangan perkebunan telah menyebabkan penurunan kualitas tanah, erosi, meningkatnya risiko bencana, serta hilangnya habitat flora dan fauna. Kondisi ini mengancam ketahanan ekosistem dan sumber daya genetik tanaman, sehingga diperlukan pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang menyeimbangkan produktivitas, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

4. Kebijakan dan regulasi

Perdagangan komoditas perkebunan Indonesia menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Salah satu tantangan adalah semakin ketatnya regulasi impor dari negara-negara tujuan perdagangan, baik terkait standar teknis maupun non-teknis. Regulasi tersebut mencakup persyaratan keamanan pangan, standar



keberlanjutan, batas residu kimia, sertifikasi lingkungan, ketelusuran (*traceability*), hingga persyaratan sosial seperti hak pekerja dan isu deforestasi. Banyak negara maju memanfaatkan instrumen non-tarif tersebut sebagai *technical barrier* untuk melindungi industri domestik dan mendorong praktik produksi yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai global terkait kesehatan, lingkungan, dan etika. Bagi komoditas seperti sawit dan karet, isu lingkungan dan deforestasi menjadi tantangan besar, sementara komoditas seperti kopi dan kakao menghadapi standar *sustainability* serta sertifikasi mutu tertentu.

Selain hambatan standar non-tarif, kebijakan tarif juga masih digunakan sebagai instrumen proteksi. Kebijakan tarif yang tinggi di negara tujuan ekspor akan mengakibatkan harga komoditas perkebunan Indonesia menjadi lebih mahal di negara tujuan sehingga berpotensi konsumen akan beralih ke produk lain yang lebih murah. Sebagai contoh dengan kebijakan tarif oleh USA, produk perkebunan seperti minyak kelapa sawit (*palm oil*), karet, kopi, dan kakao yang diekspor ke USA menjadi relatif lebih mahal dibandingkan produk dari negara lain atau produk domestik USA sendiri seperti minyak kedelai, minyak canola, minyak bunga matahari, dll.

Selain itu, kebijakan tarif di negara tujuan ekspor masih menjadi instrumen proteksi yang menurunkan daya saing harga produk perkebunan Indonesia dibandingkan produk negara lain atau substitusi domestik negara tujuan. Dinamika kebijakan fiskal dan moneter, baik domestik maupun global, turut memengaruhi biaya produksi, investasi, dan daya saing ekspor melalui perubahan pajak, subsidi, suku bunga, nilai tukar, serta tekanan inflasi yang meningkatkan biaya usaha dan kerentanan sosial ekonomi pekebun.

Ketidakstabilan geopolitik global, termasuk konflik, ketegangan perdagangan, dan gangguan logistik internasional, semakin menambah ketidakpastian perdagangan dan harga komoditas perkebunan. Kondisi ini meningkatkan risiko usaha, melemahkan posisi tawar produsen, dan berpotensi menurunkan kinerja ekspor subsektor perkebunan nasional.

5. Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Produktivitas subsektor perkebunan nasional masih menghadapi tantangan mendasar, terutama pada perkebunan rakyat. Rendahnya produktivitas antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), dan *Good Manufacturing Practices* (GMP), keterbatasan kapasitas teknis petani, minimnya pelatihan dan pendampingan, serta lemahnya infrastruktur budidaya dan pascapanen. Kondisi ini berdampak pada rendahnya hasil, mutu produk yang tidak konsisten, serta meningkatnya risiko penolakan ekspor akibat ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan pangan.

Selain aspek teknis, tingginya proporsi tanaman tua dan rusak, penggunaan benih tidak bersertifikat, adanya serangan OPT, serta rendahnya pemanfaatan sarana produksi bermutu turut memperburuk kinerja produktivitas. Sistem perbenihan perkebunan masih menghadapi keterbatasan pasokan, ketidaktepatan waktu distribusi, dan minimnya investasi infrastruktur perbenihan. Di sisi lain, keterbatasan lahan, degradasi kualitas lahan, persaingan pemanfaatan ruang, serta dampak perubahan iklim dan gangguan usaha perkebunan semakin menekan kapasitas produksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi terpadu melalui peremajaan kebun, penguatan sistem perbenihan, peningkatan adopsi teknologi, serta dukungan kelembagaan dan infrastruktur untuk mendorong peningkatan produktivitas perkebunan secara berkelanjutan.

Analisis potensi dan permasalahan pada pembahasan di atas menyajikan hasil analisis lingkungan strategis terhadap lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Ditjen Perkebunan dalam kurun waktu 2025–2029. Analisis dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang berkembang, serta menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan subsektor perkebunan yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, potensi dan permasalahan tersebut dapat dijadikan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang masing-masing kategori terdapat peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*). Pengelompokan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:



Tabel 3. Peluang dan Tantangan berdasarkan Kategori

Kategori	Opportunities (O)	Threats (T)
 Pasar Permintaan Global	1 Meningkatnya permintaan global komoditas perkebunan berbasis pangan, energi terbarukan, bahan baku industri dan berkelanjutan	1 Fluktuasi permintaan komoditas perkebunan akibat ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik
	2 Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk pangan yang aman dan bermutu serta ramah lingkungan	2 Penolakan produk ekspor akibat standar kualitas yang rendah, residu pestisida, dan cemaran lainnya
	3 Diversifikasi produk bernilai tambah	3 Ketidakstabilan hasil perkebunan dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas
	4 Modernisasi rantai distribusi untuk meningkatkan efisiensi ketelusuran dan daya saing produk perkebunan	4 Keterbatasan infrastruktur dan investasi logistik, Tingginya biaya investasi, kesiapan SDM dan kelembagaan pelaku usaha yang belum merata, ketidakpastiaan regulasi dan standar dan keamanan sistem digital
 Teknologi	1 Inovasi teknologi baru dalam budidaya/pengolahan hasil perkebunan	1 Biaya adopsi teknologi cukup tinggi
	2 Penerapan teknologi modern: Integrasi IoT, drone, dan pertanian presisi	2 Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam adopsi teknologi
	3 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemasaran hasil perkebunan	3 Keterbatasan sarana pemasaran digital, Kesenjangan literasi dan akses TIK pekebun, Ketatnya standar pasar digital

Kategori	Opportunities (O)	Threats (T)
 Lingkungan	1 Persyaratan perdagangan internasional terkait standar perkebunan berkelanjutan	1 Standar keberlanjutan internasional makin ketat, Resiko penolakan dan hambatan non tarif
	2 Teknologi pengelolaan lingkungan dan konservasi kesuburan lahan	2 Degradasi lahan
	3 Potensi sumber energi terbarukan dari limbah komoditas perkebunan	3 Biaya pemenuhan regulasi lingkungan
	4 Potensi perkebunan regeneratif (TST)	4 Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan
 Kebijakan & Regulasi	1 Program Reforma Agraria	1 Ketatnya regulasi impor negara tujuan
	2 Dukungan pemerintah untuk komoditas strategis	2 Kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong inflasi
	3 Penerapan program energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio energi	3 Tekanan persaingan internasional, ketatnya standar keberlanjutan, kserta resiko alih fungsi komoditas yang mengganggu keseimbangan pasokan pangan dan ekspor
 Produktivitas	1 Ketersediaan benih unggul	1 Mayoritas pekebun belum menerapkan GAP
	2 Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	2 Tanaman perkebunan banyak yang sudah tua dan penggunaan benih asalan oleh petani
	3 Dukungan pembiayaan usaha perkebunan	3 Keterbatasan akses modal
	4 Mitigasi perubahan iklim melalui adopsi teknologi budidaya	4 Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim

1.3 Capaian Direktorat Jenderal Perkebunan

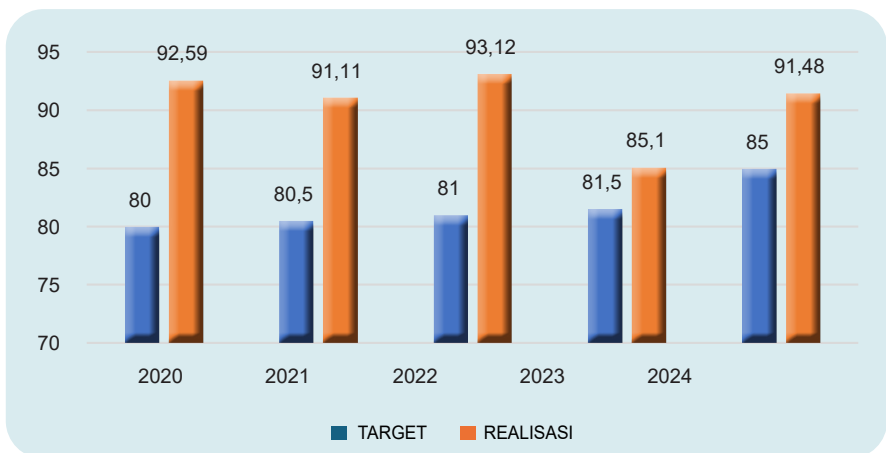
Selama periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Sepanjang periode



pelaporan, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menunjukkan berbagai capaian positif dalam pelaksanaan program prioritas. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama yang secara umum menunjukkan tren yang progresif, meskipun di beberapa aspek masih menghadapi tantangan struktural dan operasional. Evaluasi atas capaian indikator ini juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan penyesuaian kebijakan ke depan.

Sub bab ini menyajikan uraian capaian Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil kerja Direktorat Jenderal Perkebunan serta mengidentifikasi area yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan strategis berikutnya. Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkebunan dalam kurun waktu 2020-2024.

1. Indikator Kinerja Program (IKP) : Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan



Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Gambar 8. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang difasilitasi pemerintah kepada pelaku usaha dan kelembagaan perkebunan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan nilai tambah, efisiensi usaha, serta keberlanjutan pemanfaatan sarana yang telah diberikan.

Berdasarkan gambar 8 hasil pengukuran kinerja, realisasi pada periode tahun 2020–2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan relatif stabil. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 92,59% dengan target sebesar 80,00%; tahun 2021 realisasi sebesar 91,11% dengan target 80,50%; dan tahun 2022 meningkat menjadi 93,12% dengan target 81,00%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang disalurkan telah dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani penerima manfaat.

Pada tahun 2023, realisasi indikator tercatat sebesar 85,10% dengan target 81,50%. Meskipun masih melampaui target, terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai kendala operasional di lapangan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun dinamika kondisi usaha. Namun demikian, indikator tetap menunjukkan kinerja positif karena realisasi masih berada di atas target yang ditetapkan.

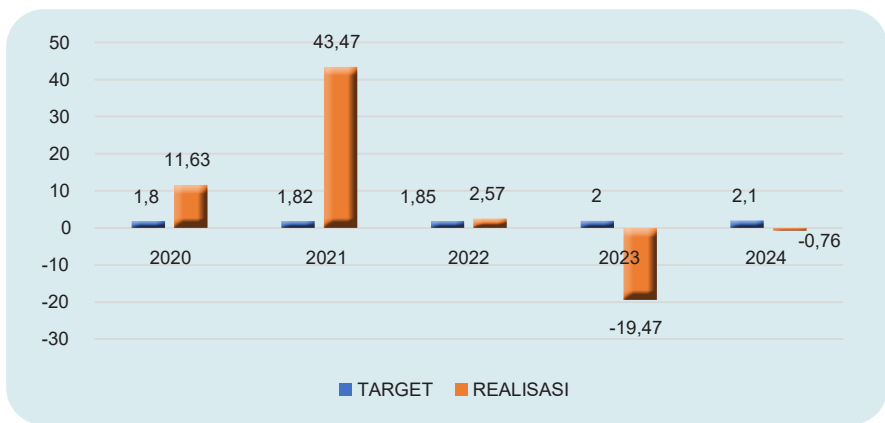
Pada tahun 2024, kinerja kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan target sebesar 85,00%, realisasi mencapai 91,48% atau setara dengan capaian sebesar 107,62% terhadap target tahunan. Selain itu, realisasi tahun 2024 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 82,00%, dengan capaian mencapai 111,56%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan telah melampaui sasaran strategis yang direncanakan meskipun periode Renstra belum sepenuhnya berakhir.

Faktor keberhasilan capaian kinerja ini meliputi (i) mekanisme penyaluran bantuan telah dilakukan secara lebih transparan dan tepat sasaran melalui pengajuan proposal oleh kelompok tani kepada pemerintah provinsi/kabupaten secara elektronik (e-proposal), (ii) koordinasi yang baik



dan terencana antara satuan kerja pusat, provinsi, dan kabupaten dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari proses verifikasi CPCL, pengadaan, hingga penyaluran sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan dan (iii) terdapat komitmen serta keinginan yang kuat dari kelompok tani penerima manfaat untuk meningkatkan mutu hasil produk perkebunan yang diolah.

2. Indikator Kinerja Program (IKP) : Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan



Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Gambar 9. Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan 2020-2024

Indikator pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan digunakan untuk mengukur peningkatan kinerja subsektor perkebunan dalam mendukung ekspor nasional serta memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Nilai ekspor komoditas perkebunan menjadi salah satu tolok ukur penting keberhasilan pembangunan perkebunan, baik dari sisi produksi, pengolahan, maupun hilirisasi produk.

Berdasarkan data capaian pada periode tahun 2020–2023, pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan nilai ekspor tercatat sebesar 11,63%, diikuti peningkatan signifikan pada tahun 2021 sebesar 43,47% sebagai dampak pemulihan ekonomi global dan

peningkatan permintaan terhadap produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Namun demikian, pada tahun 2022, pertumbuhan ekspor mulai melambat menjadi 2,57%, dan selanjutnya mengalami kontraksi cukup tajam pada tahun 2023 sebesar -19,47% yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas dunia serta melemahnya permintaan pasar ekspor utama.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan ditetapkan sebesar 2,10%, namun realisasi yang dicapai hanya -0,76% sehingga capaian terhadap target tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar -36,19%. Dengan demikian, capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra 2020–2024 juga tercatat sebesar -36,19% dari target yang ditetapkan sebesar 2,10%.

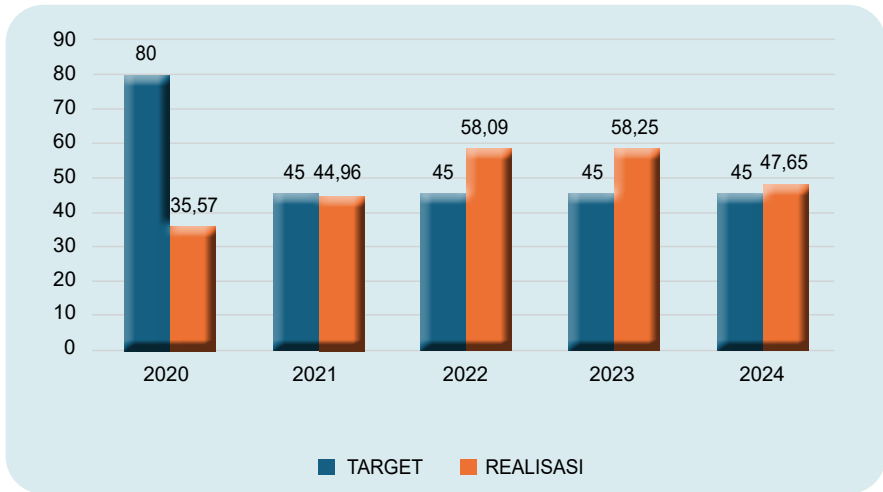
Kinerja yang belum mencapai target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain fluktuasi harga komoditas di pasar global, kebijakan proteksionisme di negara tujuan ekspor, dan penurunan permintaan terhadap beberapa produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Di sisi lain, faktor internal seperti keterbatasan infrastruktur pendukung hilirisasi, masih rendahnya diversifikasi produk olahan, serta terbatasnya penetrasi pasar ekspor nontradisional turut memberikan dampak terhadap capaian indikator ini.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yakni (i) penguatan tata kelola dan koordinasi kebijakan, (ii) reformasi regulasi dan fasilitasi perdagangan, (iii) diversifikasi dan ekspansi pasar ekspor, (iv) diplomasi ekonomi dan promosi terpadu, (v) peningkatan daya saing dan hilirisasi, (vi) penguatan sdm dan kelembagaan, (vii) pengembangan intelijen pasar dan stabilitas produksi, dan (viii) peran aktif di forum internasional.

3. Indikator Kinerja Program (IKP) : Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja ini capaian kinerja selama periode pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Sepanjang tahun 2020–2024, indikator ini memperlihatkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan, mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan kebijakan perlindungan perkebunan di tingkat pusat dan daerah.





Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Gambar 10. Capaian Kinerja Rasio serangan OPT yang Ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan 2020-2024

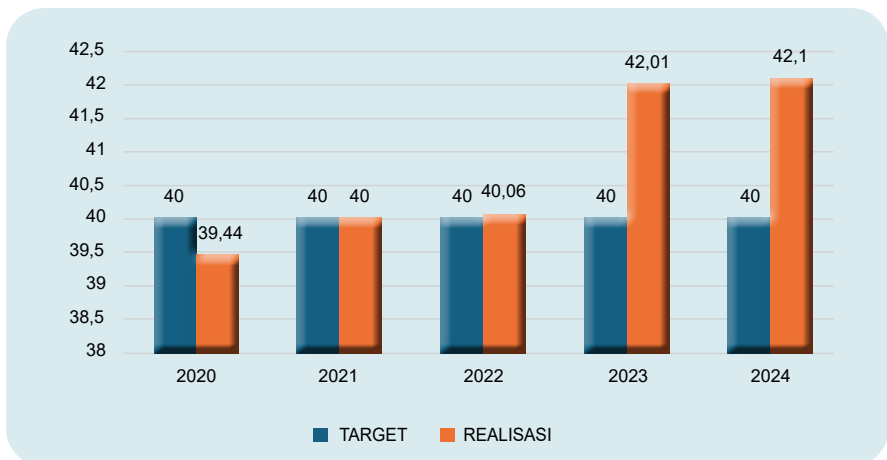
Pada periode 2020–2023, rasio serangan OPT yang ditangani menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, capaian rasio tercatat sebesar 35,57%, kemudian meningkat menjadi 44,96% pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 58,09%, dan tetap berada pada tingkat tinggi pada tahun 2023 sebesar 58,25%. Tren ini mencerminkan semakin meningkatnya efektivitas upaya pengendalian OPT tanaman perkebunan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2024, target indikator ditetapkan sebesar 45%, dengan realisasi capaian sebesar 47,65%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 105,89% dari target yang direncanakan. Capaian tersebut sekaligus telah melampaui target akhir Rencana Strategis yang juga ditetapkan sebesar 45% sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis pengendalian serangan OPT tanaman perkebunan telah tercapai, bahkan melebihi ekspektasi.

Capaian ini didukung oleh konsistensi pelaporan luas serangan dan pengendalian OPT oleh daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pembinaan teknis kepada satuan kerja daerah dan sosialisasi kepada petani turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi dan efektivitas pengendalian OPT di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia teknis di daerah (pengamat hama, pemandu lapang, dan petugas laboratorium), kesadaran petani dalam melakukan pengendalian OPT secara mandiri masih relatif rendah, keterlambatan pelaporan realisasi kegiatan, serta dinamika penganggaran berupa pemfokusan ulang (*refocusing*) dan revisi anggaran yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Kendala tersebut berdampak pada variasi capaian kinerja antarwilayah dan antarperiode pelaporan.

4. Indikator Kinerja Program (IKP) : Rasio Luas Area yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI



Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebonan 2020-2024

Gambar 11. Capaian Kinerja Rasio Luas Area yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI 2020-2024



Berdasarkan grafik perkembangan indikator terlihat bahwa target kinerja ditetapkan relatif stabil sebesar 40% sepanjang periode 2020–2024. Kebijakan penetapan target yang konstan ini mencerminkan kehati-hatian dalam perencanaan, dengan mempertimbangkan dinamika luas serangan DPI, keterbatasan sumber daya, serta kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Pada tahun 2020, realisasi kinerja mencapai 39,44%, sedikit di bawah target. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan intensitas penanganan dan penyesuaian awal terhadap pola penyebaran DPI di sejumlah wilayah sentra. Namun demikian, capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi penguatan strategi di tahun berikutnya.

Memasuki tahun 2021, realisasi meningkat menjadi 40,00%, setara dengan target. Capaian ini menunjukkan mulai efektifnya langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan koordinasi pusat dan daerah, penajaman lokasi prioritas penanganan, serta perbaikan mekanisme pelaporan dan pengendalian kegiatan.

Pada tahun 2022, kinerja kembali mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 40,06%, atau melampaui target sebesar 0,06 poin persentase. Meskipun peningkatannya relatif kecil, capaian ini menegaskan konsistensi pelaksanaan penanganan DPI dan stabilitas kinerja program di tengah fluktuasi luas serangan.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi melonjak menjadi 42,01%, atau 105,03% terhadap target. Kenaikan sebesar 1,95 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2022 mencerminkan dampak positif dari penguatan intervensi lapangan, optimalisasi dukungan anggaran, serta semakin tepatnya penetapan lokasi sasaran penanganan DPI.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi mencapai 42,10%, lebih tinggi 2,10 poin persentase dibandingkan target 40%, atau setara dengan tingkat capaian 105,25%. Capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, tetapi juga menegaskan bahwa target akhir Renstra sebesar 40% telah terlampaui secara berkelanjutan.

5. Indikator Kinerja Program (IKP) : Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan



Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Gambar 12. Capaian Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2023

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan Ditjen. Perkebunan dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

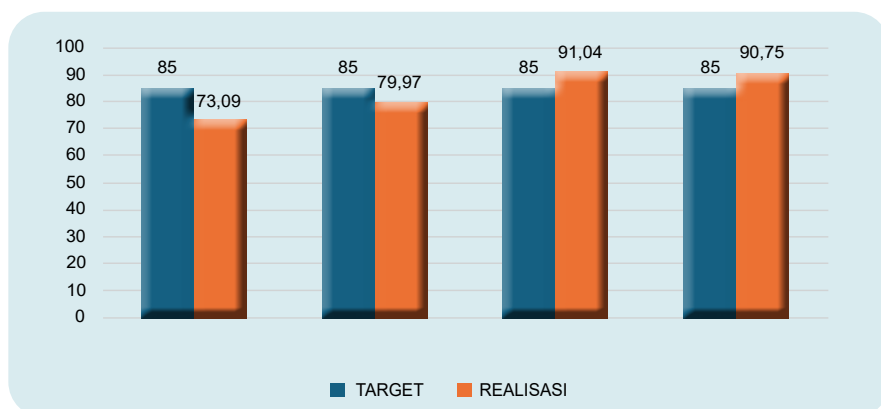
Berdasarkan data pendukung hasil penilaian Reformasi Birokrasi periode Tahun 2020–2023, terlihat adanya tren peningkatan nilai RB yang stabil dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, realisasi nilai Reformasi Birokrasi berada pada angka 32,58. Nilai ini meningkat pada Tahun 2021 menjadi 33,51, kemudian kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan realisasi mencapai 35, melampaui target yang ditetapkan sebesar 32,72. Kondisi tersebut berlanjut pada Tahun 2023, di mana realisasi nilai Reformasi Birokrasi tetap berada pada angka 35, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 32,75.



Tren positif capaian Reformasi Birokrasi pada periode 2020–2023 tersebut menjadi landasan yang kuat dalam penetapan target dan pengukuran kinerja IK 3-1 pada Tahun 2024. Dengan mempertimbangkan capaian historis tersebut, Ditjen. Perkebunan menetapkan target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 76,91%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah 74,77%, sehingga tingkat capaian indikator mencapai 97,22% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan pada indikator ini karena regulasi untuk pengukuran sudah diperbarui dengan metode yang baru, sehingga metode pengukuran yang lama sudah tidak digunakan. Indikator Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan diubah menjadi persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Ditjen Perkebunan. Target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 76,91%. Realisasi yang berhasil dicapai adalah 74,77%, sehingga tingkat capaian indikator mencapai 97,22% dari target yang ditetapkan. Pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Ditjen. Perkebunan saat ini berfokus pada pelaksanaan 8 kegiatan utama (RB General) yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis RB meliputi tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), capaian indikator kinerja utama (IKU), tindak lanjut rekomendasi audit, indeks berAKHLAK, survei penilaian integritas KPK, survei kepuasan masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen. Perkebunan telah berjalan dengan cukup optimal dan konsisten, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target secara penuh.

6. Indikator Kinerja Program (IKP) : Nilai Kinerja Anggaran



Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Gambar 13. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023

Pada tahun 2020, realisasi kinerja anggaran tercatat sebesar 73,09, masih berada di bawah target. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan awal dalam pelaksanaan anggaran, yang dapat dipengaruhi oleh faktor penyesuaian kebijakan, kapasitas pelaksanaan, maupun kondisi eksternal yang berdampak pada efektivitas penyerapan dan kualitas belanja.

Realisasi kinerja anggaran tahun 2021 meningkat menjadi 79,97. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meskipun capaian tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kinerja anggaran menunjukkan lonjakan yang lebih kuat pada tahun 2022, dengan realisasi mencapai 91,04, melampaui target sebesar 85. Capaian ini mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan anggaran, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung pada kualitas belanja.

Pada tahun 2023, realisasi kinerja anggaran tetap berada pada level yang sangat baik, yakni 90,75, dan kembali melampaui target. Konsistensi capaian di atas target ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola anggaran yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan secara berkelanjutan.



Tahun 2024, terjadi perubahan pengukuran indikator yang sebelumnya menggunakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi aspek kualitas perencanaan, aspek kualitas pelaksanaan dan aspek kualitas hasil. Berdasarkan evaluasi kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tercatat capaian keseluruhan yang sangat baik. Nilai Akhir diperoleh sebesar 89,72. Angka ini merepresentasikan tata kelola anggaran yang tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga patuh pada prinsip pengelolaan keuangan negara.







BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN



BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

2.1 Visi Direktorat Jenderal Perkebunan

Setiap organisasi membutuhkan Visi sebagai tujuan akhir yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan. Organisasi yang baik dan terarah adalah organisasi yang memiliki visi yang jelas serta perencanaan yang komprehensif. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang di dalam RPJMN, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama. Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:



**“Bersama Indonesia Maju,
Menuju Indonesia Emas 2045”**

Dalam mewujudkan Visi Presiden, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:



**“Pertanian Maju Berkelanjutan
serta Bermanfaat bagi Rakyat
Indonesia dalam Rangka
Mewujudkan Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045”**

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju



sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen. Perkebunan) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian memiliki Visi yang selaras dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian guna mewujudkan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Visi Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 adalah:



**"Perkebunan Bernilai Tambah,
Berdaya Saing, Berkelanjutan
dan Bermanfaat bagi Rakyat
Indonesia"**

Visi Ditjen. Perkebunan ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Perkebunan bernilai tambah**
Kata kunci "Perkebunan Bernilai Tambah" bermakna bahwa produk hasil perkebunan berbasis hilirisasi sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pekebun, dalam hal ini adalah harga jual yang lebih tinggi. Pola pikir hilirisasi ini harus dapat dibangun dari on farm, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan dapat dijaga secara konsisten.
- **Perkebunan berdaya saing**
Kata kunci "Perkebunan Berdaya Saing" bermakna bahwa produk hasil perkebunan dalam negeri dapat bersaing dan menjadi pilihan konsumen, baik di dalam maupun di luar negeri.
- **Perkebunan Berkelanjutan**
Kata kunci "Perkebunan Berkelanjutan" bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas perkebunan

guna memenuhi kebutuhan manusia dilakukan secara lebih baik, ramah lingkungan, dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai amanat Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber daya perkebunan yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.

- **Perkebunan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Perkebunan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan perkebunan juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan perkebunan tersebut, maka rakyat akan mendapatkan manfaat, diantaranya adalah:

1. Komoditas perkebunan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pangan asal perkebunan dalam negeri. Sehingga rakyat dapat menikmati hasil produksi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Komoditas perkebunan juga bermanfaat untuk menjadi bahan baku industri dan bio energi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri serta mendukung terwujudnya ketahanan energi.
3. Produk hasil perkebunan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekspor, sehingga berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
4. Budidaya, hilirisasi dan pemasaran komoditas perkebunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup pekebun menjadi lebih baik.

2.2 Misi Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan yang selaras dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapir masyarakat yang adil dan makmur.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian.
3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.
4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.
5. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka **Misi Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:**

1. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Nasional dan Mengantisipasi Dampak Krisis Pangan Dunia.

Misi ini menekankan pada peningkatan produksi komoditas perkebunan strategis dengan menerapkan sistem budidaya pertanian berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal perkebunan nasional. Selain itu, peningkatan produksi secara berkelanjutan diharapkan juga dapat mengantisipasi dampak krisis pangan dunia di masa yang akan datang. Pemerintah optimis komoditas perkebunan dapat menjadi salah satu andalan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan nasional, sehingga harga pangan asal perkebunan diharapkan dapat lebih stabil sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Perkebunan Berbasis Hilirisasi.

Misi ini menitikberatkan kepada peningkatan nilai tambah maupun daya saing produk hasil perkebunan melalui hilirisasi pertanian asal perkebunan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Pembinaan maupun pemberdayaan akan dilakukan dalam membangun kesadaran pekebun dan pelaku usaha perkebunan untuk lebih memprioritaskan menjual *end product* daripada produk dasar, sehingga hilirisasi dapat terwujud dan produk perkebunan tersebut memiliki nilai tambah dibanding sebelumnya. Selain itu, penjaminan mutu dan keamanan produk komoditas perkebunan juga menjadi bagian dari upaya strategis yang harus dilakukan dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen kepada produk pertanian nasional, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional.

Komoditas perkebunan tidak hanya bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional saja, namun juga memenuhi kebutuhan non pangan, dimana yang menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta bahan baku bioenergi. Beberapa industri di dalam negeri sangat bergantung pada beberapa komoditas perkebunan, misalnya industri ban nasional yang bergantung pada produksi tanaman karet, industri olahan minyak nabati yang bergantung pada produksi tanaman kelapa sawit, dan lain sebagainya. Sehingga, ketersediaan bahan baku industri dari hasil perkebunan



dalam negeri akan menciptakan stabilitas harga bahan baku di industri sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga konsumen dan dapat mengendalikan inflasi. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), khususnya bioenergi, maka dibutuhkan bahan baku bioenergi dari komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan tebu. Ketersediaan bahan baku bioenergi ini secara langsung berdampak terhadap terwujudnya bioenergi sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Untuk itu, produksi komoditas pertanian non pangan strategis menjadi salah satu faktor kritis dalam pembangunan nasional.

3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Ditjen. Perkebunan yang Baik (Good and Clean Government).

Organisasi yang baik adalah organisasi dengan tata kelola yang baik, terstandar secara nasional dan konsisten dalam pelaksanaannya. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan standar tata kelola pemerintah dalam suatu kerangka Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang pelaksanaannya meliputi level Makro (nasional), Meso (lintas K/L) maupun mikro (K/L). Misi ini menekankan kontribusi Ditjen. Perkebunan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di level Mikro, yaitu RB Kementerian Pertanian. Selain itu, misi ini juga menekankan pada pelaksanaan dukungan manajemen lainnya yaitu layanan internal dalam mendukung pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi dalam mewujudkan Visi tahun 2025-2029. Sama halnya dengan Misi, maka Tujuan Direktorat Jenderal merupakan bagian dari Tujuan Kementerian Pertanian, sehingga perlu dipastikan keselarasan strategis diantara keduanya. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan petani.
2. Tujuan 2: Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas.

3. Tujuan 3: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat.
4. Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan.
5. Tujuan 5: Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan akuntabel dan professional.

Berdasarkan tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan adalah:

1. Tujuan 1: Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan dari Produksi Dalam Negeri

Tujuan 1 Ditjen. Perkebunan ini merupakan lingkup dipersempit dari Tujuan 2 Kementerian Pertanian, yaitu "Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas". Swasembada pangan asal perkebunan tentunya akan berdampak terhadap terwujudnya swasembada pangan nasional sehingga mampu menciptakan kemandirian pangan nasional. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.1: Persentase Komoditas Perkebunan yang Mencapai Swasembada terhadap Komoditas Prioritas

2. Tujuan 2: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan

Tujuan 2 Ditjen. Perkebunan ini merupakan bagian dari Tujuan 3 Kementerian Pertanian, yaitu "Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat." Pembangunan subsektor perkebunan dalam mendukung transformasi ekonomi, melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan daya saing komoditas perkebunan secara berkelanjutan. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT 2: Pertumbuhan PDB Perkebunan
- IT 3: Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi



3. Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan yang Transparan, Akuntabel dan Profesional

Tujuan 3 Ditjen. Perkebunan ini merupakan bagian dari Tujuan 5 Kementerian Pertanian, yaitu terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional. Tujuan ini merepresentasikan pelaksanaan RB Ditjen. Perkebunan serta dukungan manajemen internal. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.3: Persentase peningkatan nilai tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan

2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Sasaran Program (SP) Ditjen. Perkebunan merupakan penjabaran operasional dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Sasaran program ini ditetapkan sebagai bentuk kontribusi nyata subsektor perkebunan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penetapan sasaran ini dirumuskan secara terukur, selaras dengan sasaran pembangunan pertanian nasional, serta mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Pelaksanaan program perkebunan dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil (*outcome*), sehingga memberikan



dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya pada subsektor perkebunan. Berikut SS Kementerian Pertanian:

Tabel 4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SS.1 Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian / NTUP (nilai)	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27
	IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian (%)	3,5	3,8	4	3,6	3,3
SS.2 Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	IKSS 2.1 persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (%)	68,09	68,09	68,09	70,21	72,34
SS 3. Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian	IKSS 3.1 <i>Market share</i> produk ekspor pertanian (%)	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
SS 4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	IKSS 4.1 Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan (Nilai Indeks)	0,23	0,41	0,66	0,84	1,00
SS 5. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	IKSS 5.1 persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi (%)	90	92	92	93	95



Sasaran Strategis	IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SS 6. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia	IKSS 6.1 persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia (%)	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7
SS 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	86,98	88,17	89,77	90,67	91,28



Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen. Perkebunan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen. Perkebunan Tahun 2025-2029

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SP.1	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit, Produksi kelapa, Produksi lada, Produksi pala, Produksi cengkeh, Produksi vanili, Produksi kopi, Produksi tebu, Produksi karet, Produksi kakao, Produksi teh, Produksi jambu mete, Produksi tanaman palma lainnya, Produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya (Ton)
SP.2	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi (Juta Ton)
SP 3	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun (Nilai)
SP 4	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan (Nilai)
SP 5	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan	Volume ekspor komoditas perkebunan (Ribuan Ton)
SP 6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan (Nilai)
SP.7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan (Indeks)

Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki tujuh Sasaran Program (SP) dan tujuh Indikator Kinerja Program (IKP) , meliputi:

1. SP 1. Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan
 Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan” yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan produksi komoditas



perkebunan sebagai landasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penguatan industri hilir, serta peningkatan daya saing komoditas perkebunan nasional. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja “produksi kelapa sawit, produksi kelapa, produksi sagu, produksi lada, produksi pala, produksi cengkeh, produksi vanili, produksi kopi, produksi tebu, produksi karet, produksi kakao, produksi teh, produksi jambu mete, produksi tanaman palma lainnya dan produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya”.

2. SP 2. Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi.

Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi dari Sektor Pertanian”. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku bioenergi berbasis komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit secara berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja “produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi”. Sasaran ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku bioenergi, dengan penanggung jawab utama pemenuhan bioenergi berada pada kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. SP 3. Meningkatnya Indeks Harga Yang Diterima Pekebun

Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Petani”. Sasaran ini mempresentasikan indeks perkembangan harga komoditas pertanian yang diterima petani saat dijual di pasar (*farm gate*). Indeks yang dihitung berdasarkan survey harga di tingkat produsen setiap bulan. Indeks digunakan sebagai komponen dalam perhitungan NTP (Nilai Tukar Petani). Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks harga yang diterima Pekebun.

4. SP 4. Terjaminnya Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan.

Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan”. Sasaran ini

mempresentasikan nilai yang menunjukkan kesesuaian mutu dan keamanan produk komoditas perkebunan terhadap standar atau kriteria tertentu yang ditetapkan. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman Perkebunan”.

5. SP 5. Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Perkebunan
Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian”. Sasaran ini merepresentasikan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan nasional. Sasaran ini mencerminkan keberhasilan peningkatan kualitas, kontinuitas pasokan, dan pemenuhan standar pasar internasional, sehingga komoditas perkebunan mampu bersaing dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi di pasar global. Sasaran ini dihitung melalui indikator kinerja “Volume Ekspor Komoditas Perkebunan”. Komoditas ekspor yang diukur adalah kelapa, sagu, kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, vanili, teh, kelapa sawit, tebu, jambu mete, tembakau, kapas, nilam, pinang, dan kayu manis.
6. SP 5. Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Perkebunan Unggulan yang Telah Menerapkan Hilirisasi
Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan”. Sasaran ini merepresentasikan indeks hilirisasi perkebunan yang diukur dari tingkat pengolahan dan nilai tambah produk perkebunan unggulan. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan”.
7. SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang Baik, Transparan dan Akuntabel
Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi”. Sasaran program ini memiliki keterkaitan langsung dengan arah kebijakan RPJMN terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sasaran ini menjadi fondasi kelembagaan yang memastikan seluruh program dan kegiatan Ditjen. Perkebunan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan”.



2.5 Manajemen Risiko

Sebagaimana Perpres 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional, penyusunan renstra K/L menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja, salah satunya penyusunan identifikasi risiko pencapaian sasaran strategis. Direktorat Jenderal Perkebunan menerapkan pendekatan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Pemetaan risiko pada Sasaran Program Ditjen. Perkebunan dilakukan secara menyeluruh. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target pada indikator kinerja sasaran program Ditjen. Perkebunan.

Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, perlakuan (mitigasi), serta pemantauan yang terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis menunjukkan enam kelompok risiko utama yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025–2029, sebagai berikut:

- Risiko Produksi dan Ketahanan Pangan
Perubahan iklim, kekeringan, banjir, serta serangan organisme pengganggu tumbuhan berpotensi menurunkan produksi. Perlakuan

(mitigasi) dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pekebun, pengembangan varietas tahan cekaman iklim, serta penerapan teknologi budidaya adaptif dan ramah lingkungan.

- **Risiko Ketersediaan dan Akses Input Produksi**
Fluktuasi harga pupuk, benih, dan pestisida di pasar global serta ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin usaha tani. Distribusi input yang belum merata juga berisiko menunda masa tanam. Mitigasi ditempuh melalui penguatan sistem distribusi berbasis digital, pengembangan industri input dalam negeri, dan koordinasi kebijakan subsidi serta bantuan sarana produksi dengan kementerian terkait.
- **Risiko Kelembagaan, SDM, dan Kapasitas Daerah**
Keterbatasan kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan petani masih menjadi kendala dalam implementasi program. Kapasitas penyuluh di beberapa daerah belum merata, sementara kelembagaan petani belum sepenuhnya berorientasi bisnis. Mitigasi dilakukan melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta pemanfaatan sistem informasi dan monitoring digital untuk percepatan transfer pengetahuan.
- **Risiko Infrastruktur dan Pembiayaan Pertanian**
Sebagian infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan sarana pascapanen masih terbatas. Walaupun alokasi anggaran Kementerian Pertanian menunjukkan tren peningkatan, kebutuhan pengembangan infrastruktur di lapangan tetap tinggi. Mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan alsintan, peningkatan akses pembiayaan KUR, serta perluasan kerja sama pembiayaan dan kemitraan swasta.
- **Risiko Pasar dan Nilai Tambah Produk Pertanian**
Fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan kapasitas hilirisasi menurunkan daya saing dan pendapatan petani. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya integrasi rantai pasok dan keterbatasan diversifikasi produk olahan. Mitigasi diarahkan pada penguatan sistem informasi pasar, pengembangan kemitraan petani dan industri, peningkatan




kapasitas pengolahan dan pascapanen, serta pengembangan kawasan berorientasi nilai tambah dan ekspor.

- Risiko Tata Kelola, Kepatuhan, dan Pengelolaan Aset
Risiko pada aspek tata kelola mencakup potensi ketidaktepatan sasaran bantuan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan, serta kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Risiko ini berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas program. Mitigasi dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan audit berbasis risiko, digitalisasi pemantauan bantuan, serta peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset pertanian.

Pemetaan risiko dalam rangka pencapaian target-target sasaran program Ditjen. Perkebunan dapat dilihat pada Lampiran 3.





A close-up photograph of several cocoa pods hanging from a tree branch. The pods are in various stages of ripeness, with colors ranging from bright yellow to deep red. The background is filled with lush green leaves, some of which are slightly out of focus. A semi-transparent white circular graphic is overlaid in the center of the image, containing the chapter title.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi nasional merupakan gambaran besar mengenai arah pembangunan jangka menengah. Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional (PN) ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden.

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi.



Kementerian Pertanian mendukung semua unsur dalam Asta Cita, namun berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3 dan PN 5. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian. Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 14. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029, tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara sebagai berikut:

1. Kemandirian pangan asal pertanian
2. Pertumbuhan volume usaha pertanian
3. Bahan baku bio energi
4. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian
5. Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular

Poin tujuan antara di atas dapat terlaksana jika koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, untuk dapat mewujudkan tujuan antara tersebut, maka pilar penyokong harus berdiri tegak. Berikut penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut



1. Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi
2. Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan
3. Pilar 3: Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung Pangan Nasional
4. Pilar 4: Pemanfaatan teknologi pertanian modern
5. Pilar 5: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani
6. Pilar 6: Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian
7. Pilar 7: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional
8. Pilar 8: Sistem Kesehatan hewan nasional

Delapan pilar di atas dapat berdiri tegak jika didukung oleh fondasi yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, terdapat 5 (lima) fondasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang produktif
2. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian
3. Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian
4. Tata kelola pertanian berkelanjutan (Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices, dll)

Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi **“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”** di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. Arah Kebijakan 1 “Peningkatan Pendapatan Petani dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- Strategi 1: Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.
- Strategi 2: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi.
- Strategi 3: Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
- Strategi 4: Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif.

2. **Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan Pangan Dalam Negeri.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
 - Strategi 5: Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan
 - Strategi 6: Menerapkan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan
 - Strategi 7: Membangun kawasan sentra produksi pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
 - Strategi 8: Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
 - Strategi 9: Pemanfaatan teknologi pertanian modern.
3. **Arah Kebijakan 3 “Memastikan Ketersediaan Bahan Baku Bio Energi dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 10** “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”
4. **Arah Kebijakan 4 “Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 11** “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
5. **Arah Kebijakan 5 “Peningkatan kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 12** “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”
6. **Arah Kebijakan 6 “Tata Kelola Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 13** “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance*”.

3.3 Arah Kebijakan dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Arah kebijakan dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025-2029 digambarkan dalam bentuk rumah strategi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rumah strategi Kementerian Pertanian seperti



diuraikan pada sub bab sebelumnya. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen. Perkebunan tersebut dapat diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar 15. Rumah Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029

Berdasarkan rumah strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen. Perkebunan pada akhir Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 adalah "Perkebunan Bernilai Tambah, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia". Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

- Pertumbuhan volume usaha perkebunan
- Kemandirian pangan asal perkebunan
- Ketersediaan bahan baku bio energi
- Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. **Pilar Strategis 1: Ketersediaan Akses Pasar Perkebunan**

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar perkebunan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk perkebunan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah:

- **Arah Kebijakan 1: Pemasaran Produk Perkebunan Bernilai Tambah dan Berdaya Saing.**
 - **Kegiatan 1.1: Pengembangan dan Perluasan Akses Pasar Domestik bagi Pelaku Usaha Perkebunan.**

Akses pasar domestik bagi pelaku usaha perkebunan, khususnya pelaku usaha perkebunan rakyat, sangat penting dalam meningkatkan produk perkebunan di dalam negeri. Ketersediaan akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pekebun ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekebun atas penjualan komoditas perkebunan.
 - **Kegiatan 1.2: Perluasan Pasar Ekspor Perkebunan Dalam Memperluas Market Share Produk Perkebunan Indonesia.**

Selain akses pasar domestik, pemerintah juga perlu memberikan fasilitasi akses pasar ekspor produk perkebunan melalui berbagai event dan kerja sama, baik nasional maupun internasional, dengan negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar ekspor produk perkebunan nasional di luar negeri, sehingga tidak hanya volume ekspor yang bertambah, namun juga diikuti negara tujuan ekspor yang tersebar di beberapa negara di dunia.

2. **Pilar Strategis 2: Budidaya Tanaman Perkebunan yang Modern dan Berkelanjutan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Industri Nasional.**

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) maupun peraturan perundang-undangan terkait perkebunan akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. Selain itu dalam rangka mendukung keberhasilan program swasembada pangan, Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi dan hilirisasi komoditas perkebunan. Kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah:

- **Arah Kebijakan 2: Produksi Perkebunan Produktif Berkelanjutan Menuju Swasembada Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Industri Nasional**
 - **Kegiatan 2.1: Meningkatkan Ketersediaan dan Kemandirian Benih Tanaman Perkebunan Bermutu**



Kegiatan ini fokus dalam penyediaan benih sesuai kebutuhan penanaman tanaman perkebunan. Kegiatan ini juga mendorong terwujudnya kemandirian benih secara bertahap melalui peningkatan wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah mandiri benih hingga produksi benih. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong petani dalam pemanfaatan varietas unggul tanaman perkebunan. Sehingga, ketersediaan dan kemandirian benih tanaman perkebunan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan mewujudkan swasembada pada komoditas perkebunan.

- **Kegiatan 2.2: Budidaya Komoditas Perkebunan Secara Optimal dan Berkelanjutan**

Kegiatan ini fokus pada penerapan budidaya komoditas perkebunan sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practices (GAP) serta peraturan perundang-undangan terkait sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Sehingga, selain optimalisasi hasil budidaya, kegiatan ini juga memastikan agar budidaya yang dilakukan dapat berkelanjutan sehingga dapat dinikmati hingga generasi berikutnya.

- **Kegiatan 2.3: Perlindungan Tanaman Perkebunan Dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI).**

Kegiatan ini fokus pada perlindungan tanaman perkebunan dari OPT agar luas panen dapat meningkat dan kehilangan potensi produksi dapat diminimalisir. Selain itu, kegiatan ini juga akan fokus pada antisipasi dampak perubahan iklim yang dapat berdampak terhadap luas panen tanaman perkebunan.

- **Kegiatan 2.4 : Penjaminan Mutu dan Keamanan Komoditas Perkebunan.**

Kegiatan ini fokus dalam menjamin kualitas mutu dan keamanan komoditas perkebunan yang dihasilkan. Mutu komoditas perkebunan perlu dijaga agar produk perkebunan nasional menjadi pilihan konsumen dibanding produk dari luar negeri. Sedangkan keamanan komoditas perkebunan perlu dipastikan untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam mengonsumsi komoditas pangan asal perkebunan dalam negeri.

3. Pilar Strategis 3: Budidaya Komoditas Perkebunan dalam Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Bio energi

Pilar budidaya komoditas perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi diarahkan untuk menjamin kesinambungan pasokan bahan baku bioenergi yang bersumber dari komoditas perkebunan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 3 ini adalah:

- **Arah Kebijakan 3: Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan Untuk Bahan Baku Bio Energi**

- **Kegiatan 3.1: Budidaya Komoditas Perkebunan untuk Bahan Baku Bioenergi**

Kegiatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas tanaman perkebunan penghasil bioenergi, optimalisasi pemanfaatan lahan eksisting, penerapan praktik budidaya berkelanjutan, penyediaan benih unggul, serta dukungan sarana dan prasarana budidaya yang sesuai dengan standar teknis dan prinsip keberlanjutan. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dalam budidaya kelapa sawit untuk mendukung bio energi.

4. Pilar Strategis 4: Hilirisasi Produk Hasil Perkebunan

Pilar ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui hilirisasi produk hasil perkebunan terintegrasi berdasarkan potensi produk dan potensi pasar yang dimiliki. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam melakukan hilirisasi produk perkebunan yang dijual, sehingga akan meningkatkan harga jual dan berdampak terhadap pertumbuhan usaha perkebunan. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan adalah:

- **Arah Kebijakan 4: Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan Bernilai Tambah dan Berdaya Saing.**

- **Kegiatan 4.1 : Pengolahan Produk Perkebunan Berbasis Hilirisasi.**

Kegiatan ini akan fokus pada pengolahan dan hilirisasi produk perkebunan nasional sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada pekebun. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendorong hilirisasi



pertanian yang berkontribusi terhadap program hilirisasi nasional.

- **Kegiatan 4.2 : Meningkatkan Kualitas Produk Ekspor Perkebunan dalam Memenuhi Permintaan Potensi Pasar Ekspor dan Negara Tujuan Ekspor**

Kegiatan ini fokus dalam meningkatkan kualitas produk ekspor perkebunan dalam memenuhi permintaan potensi pasar maupun negara tujuan ekspor produk perkebunan. Pemenuhan permintaan potensi pasar maupun pasar ekspor produk perkebunan ini penting dilakukan dalam meningkatkan nilai tambah maupun daya saing produk ekspor perkebunan.

5. Fondasi Strategis: SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen Perkebunan

Fondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis. Dalam konteks strategi, fondasi strategis merupakan strategic assets atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen. Perkebunan ini terdiri atas Sumber Daya Manusia, organisasi dan kelembagaan maupun tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan.

Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Fondasi Strategis ini adalah:

- **Arah Kebijakan 5: Birokrasi Ditjen. Perkebunan yang Transparan dan Akuntabel**
 - **Kegiatan 5.1: Mengembangkan Modal Manusia (*Human Capital*) SDM ASN Ditjen. Perkebunan yang Produktif.**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, pengembangan SDM sebagai modal manusia menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan Ditjen Perkebunan. Kegiatan ini fokus pada pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Perkebunan, meliputi Perencanaan SDM ASN, rekrutmen dan seleksi (talent acquisition), pengelolaan kinerja SDM ASN (SKP dan perilaku kerja), pembelajaran dan pengembangan SDM, manajemen karier, kesejahteraan SDM ASN, kepuasan kerja SDM ASN, hingga program purna bhakti.

- **Kegiatan 5.2: Mengembangkan Tata Kelola Organisasi Ditjen. Perkebunan yang Tepat Fungsi dan Ukuran.**
Kegiatan ini fokus pada penerapan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*organization right sizing*) sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara cerdas (*smart work*), efektif dan efisien dengan produktivitas yang tinggi. Tata kelola organisasi yang dimaksud tidak hanya struktural, namun juga pemetaan jabatan fungsional sehingga dapat mewujudkan kesesuaian antara pekerjaan dengan SDM ASN yang mengerjakan (*job-person fit*).
- **Kegiatan 5.3: Mendukung Pelaksanaan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Sesuai Kewenangan Ditjen Perkebunan**
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu amanat pembangunan nasional yang harus dilakukan seluruh K/L/D, termasuk Kementerian Pertanian. Ditjen. Perkebunan sebagai salah satu unsur pelaksana utama Kementerian Pertanian harus berkontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Ditjen Perkebunan. Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen. Perkebunan yang selaras dengan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian.
- **Kegiatan 5.4: Memberikan Layanan Internal Lingkup Ditjen. Perkebunan Yang Berkualitas dan Berbasis Digital.**
Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan dukungan manajemen internal dalam mendukung seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen. Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Perkebunan.

3.4 Kerangka Regulasi

Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja KL bahwa kerangka regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan penugasan yang mencakup



arahan Presiden dan atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga khususnya Ditjen. Perkebunan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Ditjen. Perkebunan secara umum adalah:

- **Peraturan Presiden (Perpres)**
 - a. Revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL)
- **Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)**
 - a. Revisi Permentan No. 07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
 - b. Penggabungan Permentan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 138/Permentan/OT,140/12/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Nilam yang Baik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Teknis Budidaya Karet yang Baik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Teh yang Baik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik.
 - c. Revisi Permentan 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
 - d. Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.
 - e. Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao.
 - f. Revisi Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
 - g. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (RPermentan) Tentang Kemitraan Pekebun Tebu dengan Pabrik Gula.
 - h. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (RPermentan) Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peta Jalan Swasembada Gula Nasional.

- i. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (RPermentan) Tentang Pelindungan Tanaman.

Detail kerangka regulasi Ditjen. Perkebunan dapat dilihat pada Lampiran Kerangka Regulasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 ini.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen. Perkebunan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan peran Ditjen. Perkebunan dalam mencapai visi Kementerian Pertanian serta agenda pembangunan jangka panjang pada RPJPN, serta prioritas pembangunan pada RPJMN. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen. Perkebunan juga mengacu kepada kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.

Kerangka kelembagaan Ditjen. Perkebunan disusun melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen Perkebunan. Kegiatan FGD dilakukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) saat ini dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pada periode Renstra 2025-2029. Permasalahan-permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun desain kriteria (*criteria design*) organisasi yang baru. Permasalahan SOTK saat ini serta desain kriteria organisasi Ditjen. Perkebunan ke depan dapat diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel 6. Permasalahan terkait SOTK dan Desain Kriteria Ditjen Perkebunan

No	Permasalahan SOTK Saat Ini	Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan
1	Direktorat pada Ditjen. Perkebunan didesain berdasarkan kelompok komoditas pertanian, sehingga berpotensi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya jika komoditas yang menjadi kewenangan Direktorat tersebut tidak menjadi prioritas Kementerian Pertanian di tahun berjalan	Unit kerja setingkat eselon II di Ditjen. Perkebunan sebaiknya didesain berdasarkan proses: (1) Perbenihan/ pembibitan (2) Penanaman dan budidaya perkebunan, (3) Perlindungan tanaman perkebunan, (4) Hilirisasi komoditas perkebunan
2	Terdapat pejabat jabatan fungsional yang ditugaskan pada unit kerja tidak sesuai dengan tugas jabatannya	Perlu redistribusi penempatan pejabat fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja

Desain kriteria organisasi Ditjen. Perkebunan dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 adalah Unit kerja setingkat eselon II berdasarkan proses bisnis utama perkebunan, yaitu:

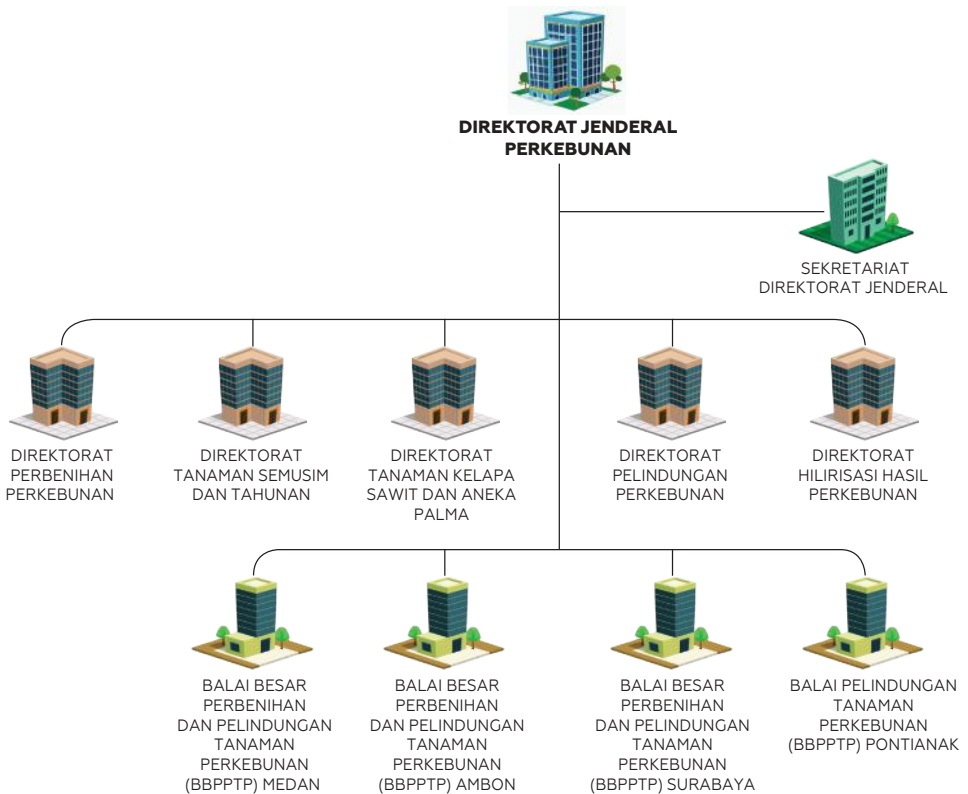
- Perbenihan/pembibitan berkelanjutan (termasuk produksi benih),
- Penanaman dan budidaya perkebunan,
- Pelindungan tanaman perkebunan,
- Hilirisasi hasil perkebunan

Desain kriteria organisasi Ditjen. Perkebunan disusun berdasarkan kebutuhan Rencana Strategis Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Desain kriteria organisasi Ditjen. Perkebunan bukan merupakan SOTK—Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian. Untuk menghasilkan struktur organisasi Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian yang ideal diperlukan analisis lebih lanjut di luar dokumen Renstra Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian ini.

Perubahan organisasi di lingkup Ditjen. Perkebunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap Direktorat Teknis lainnya di

lingkup Kementerian Pertanian. Perubahan tersebut harus sejalan dengan kebijakan dan arah Kementerian Pertanian, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, dan harus konsisten dan selaras dengan struktur dan system yang ada.

Struktur Organisasi Ditjen. Perkebunan berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:



Gambar 16. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.




Pengelompokan dilakukan berdasarkan aktivitas bukan berdasarkan unit organisasi yang dilakukan didalam instansi pemerintah secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Ditjen Perkebunan mengusulkan Peta Proses Bisnis untuk masuk dalam Rancangan Peta Proses Bisnis Kementerian 2025-2029 yang saat ini sedang disusun oleh Biro Organisasi dan SDM Aparatur, adalah sebagai berikut:

Kode	Proses	Kode	Sub Proses	Kode	Peta Lintas Fungsi
TANI-01	Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian	TANI-01.01	Pengelolaan Benih dan Bibit	TANI-01.01. PLF-01.	Pengelolaan Benih Tanaman
		TANI-01.03	Pengembangan Komoditas Pertanian	TANI-01.03. PLF-01.	Pengembangan Kawasan Pertanian
				TANI-01.03. PLF-02.	Penerapan <i>Good Agriculture Practises</i> (GAP)
		TANI-01.04	Pelindungan Tanaman	TANI-01.04. PLF-01.	Pengelolaan Pengendalian OPT
				TANI-01.04. PLF-02.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim
				TANI-01.04. PLF-03.	Pencegahan Kebakaran Lahan Perkebunan
TANI-02	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	TANI-02.01	Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen	TANI-02.01. PLF-01.	Pengelolaan Pascapanen
		TANI-02.02	Peningkatan Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian	TANI-02.02. PLF-01.	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Komoditas Pertanian
				TANI-02.02. PLF-02.	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Kode	Proses	Kode	Sub Proses	Kode	Peta Lintas Fungsi
		TANI-02.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Pertanian	TANI-02.03. PLF-01.	Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian
				TANI-02.03. PLF-02.	Pengembangan Usaha dan Investasi Komoditas Pertanian
		TANI.02.04	Peningkatan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Komoditas Pertanian	TANI-02.04. PLF-02.	Pengembangan Sistem Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Pertanian
		TANI.02.05	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Usaha	TANI-02.05. PLF-01.	Pengawasan Usaha Perkebunan
				TANI-02.05. PLF-02.	Pembinaan Usaha Perkebunan





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Ditjen Perkebunan

Target kinerja merupakan pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini berfungsi sebagai tolok ukur konkret untuk menilai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategisnya. Dalam praktiknya, target kinerja mencakup tiga level utama: **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**, yang mengukur pencapaian tujuan jangka panjang organisasi di tingkat Kementerian, **Indikator Kinerja Program (IKP)**, yang mengevaluasi efektivitas program-program prioritas; dan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**, yang fokus pada output spesifik dari aktivitas operasional.

Terdapat tujuh indikator kinerja sasaran program yang menjadi barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian Intermediate Outcome level 2 dari suatu program. IKSP kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel berikut memperlihatkan keterkaitan Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan serta Target tahun 2025 – 2029.



Tabel 7. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Program Ditjen. Perkebunan 2025-2029

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program (Ikp)		Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP.1	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan						
1.1	Produksi Kelapa Sawit	Ton	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690
1.2	Produksi Kelapa	Ton	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021
1.3	Produksi Sagu	Ton	393.623	413.304	433.969	455.667	478.451
1.4	Produksi Lada	Ton	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666
1.5	Produksi Pala	Ton	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693
1.6	Produksi Cengkeh	Ton	133.570	133.703	133.837	133.971	134.105
1.7	Produksi Vanili	Ton	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588
1.8	Produksi Kopi	Ton	780.957	786.119	791.434	796.776	802.210
1.9	Produksi Tebu	Ton	36.813.539	39.555.979	42.478.762	60.450.243	84.714.460
1.10	Produksi Karet	Ton	2.496.364	2.470.676	2.756.865	2.917.026	3.080.114
1.11	Produksi Kakao	Ton	632.787	633.290	633.792	634.294	634.796
1.12	Produksi Teh	Ton	116.555	116.579	116.602	116.624	116.648
1.13	Produksi Jambu Mete	Ton	136.642	136.915	137.257	137.600	138.013
1.14	Produksi Tanaman Palma Lainnya	Ton	188.236	189.899	192.270	194.173	195.953

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program (Ikp)		Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ton	317.790	383.719	400.831	417.946	435.065
SP.2 Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi							
2.1	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Juta Ton	66,37	87,35	89,97	93,67	98,78
SP 3 Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun							
3.1	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai	154,80	160,10	165,70	171,40	177,30
SP 4 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan							
4.1	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
SP 5 Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan							
5.1	Volume ekspor komoditas perkebunan	ribu ton	38.224,00	38.415,00	38.607,00	38.800,00	38.994,00
SP 6 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi							
6.1	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Nilai	1,30	1,50	1,80	2,00	2,20



Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program (Ikp)	Satuan	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel						
7.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85

Sasaran program akan diturunkan ke sasaran kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- SP 1. Terpenuhinya produksi komoditas perkebunan
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Pelindungan Perkebunan, Direktorat Perbenihan dan UPT lingkup Ditjen. Perkebunan.
- SP 2. Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.
- SP 3. Meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
- SP 4. Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
- SP 5. Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
- SP 6. Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
- SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel
Sasaran ini diturunkan ke Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan UPT lingkup Ditjen. Perkebunan.

4.2 Kerangka Pendanaan Ditjen. Perkebunan

Kerangka pendanaan ini dirancang sebagai landasan finansial yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, selaras dengan tujuan pembangunan sektor perkebunan serta prioritas nasional.

Dalam penyusunannya, kerangka pendanaan tidak hanya mempertimbangkan aspek **ketersediaan** anggaran, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup:

1. **Sumber pendanaan** dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. **Alokasi anggaran**, yang disusun berdasarkan **skala prioritas program** yakni peningkatan produksi, pengembangan hilirisasi perkebunan, penguatan kapasitas petani, promosi pasar dan kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran.
3. **Mekanisme pengelolaan keuangan**, yang mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, pengawasan yang ketat, dan pelaporan yang terukur untuk meminimalisasi risiko pemborosan atau penyimpangan.

Selain itu, kerangka pendanaan ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi **lingkungan** (seperti pendanaan untuk perkebunan berkelanjutan) maupun ekonomi (seperti insentif bagi petani dan pelaku usaha kecil). Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya mendukung pencapaian target jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang sektor perkebunan Indonesia.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Ditjen. Perkebunan berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi dan misinya, yakni meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan serta memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, target kinerja dan kerangka pendanaan Ditjen. Perkebunan dapat dilihat pada lampiran I Matrik Kinerja dan Pendanaan Ditjen. Perkebunan 2025–2029.





BAB V PENUTUP



BAB V PENUTUP

Renstra Ditjen. Perkebunan 2025-2029 merupakan komitmen kuat untuk memajukan sektor perkebunan Indonesia secara menyeluruh. Selama lima tahun mendatang, seluruh program dan kegiatan akan difokuskan pada tiga pilar utama: **peningkatan produktivitas, penguatan nilai tambah dan daya saing, dan perluasan akses pasar produk perkebunan nasional**, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Keberhasilan Renstra ini memerlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, asosiasi, petani, serta lembaga internasional dan mitra pembangunan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, Ditjen. Perkebunan akan melakukan pemantauan berkala melalui pengukuran dan evaluasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja kepada publik untuk menjamin transparansi. Ditjen. Perkebunan yakin bahwa perkebunan Indonesia tidak hanya akan menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Untuk itu, Ditjen. Perkebunan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan visi besar ini melalui semangat gotong royong, inovasi, dan kerja keras.





LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS

**Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
2025-2029**



LAMPIRAN 1. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN. PERKEBUNAN 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Pertanian													
SS 1	Meningkatnya pendapatan petani												
IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	Nilai	122,27	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27					
IKSS 1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,22	3,50	3,80	4,00	3,60	3,30					
SS 2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan												
IKSS 2.1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	%	Indikator baru	66	68	68	70	72					
SS 3	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian												
IKSS 3.1	Market share produk ekspor pertanian	%	Indikator baru	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85					
SS 4	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan												
IKSS 4.1	Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan	Indeks	Indikator baru	0,23	0,41	0,66	0,84	1,00					
SS 5	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian												



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSS 5.1	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi	%	Indikator baru	90	92	92	93	95						
SS 6	Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia													
IKSS 6.1	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia	%	Indikator baru	2,70	2,70	2,70	2,70	1,70						
SS 7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi													
IKSS 7.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	85,11	86,98	88,17	89,77	90,67	91,28						
Direktorat Jenderal Perkebunan									3.074.943,07	5.998.172,65	3.397.782,31	2.288.833,05	2.311.395,47	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									108.999,40	127.716,38	128.216,38	128.216,38	128.216,38	
SP.5	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel													
IKP 5.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Indeks	Indikator baru	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	108.999,40	127.716,38	28.216,38	128.216,38	128.216,38	
018.WA - Program Dukungan Manajemen														

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan												
SK 1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal											
IKK 1.1	%	-	85	85	88	88	90	108,999,40	127,716,38	128,216,38	128,216,38	128,216,38
IKK 1.2	%	-	90	90	90	90	90					
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal											
1780.EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	7	22	22	22	22	22	22	22	22
1780.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	Dokumen	4	5	26	26	26	26	26	26	26	26
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal											
1780.EBA.Z06	- Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1780.EBA.Z07	- Layanan BMN UPT Pusat	Layanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan											
IKK 2.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan	Nilai	89,70	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00				



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	89,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780.EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1780.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan UPT Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SK 3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan														
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan	Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
IKK 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
IKK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
IKK 3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)																			
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029															
1780.EBD.Z33 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1																			
1780.EBC Layanan Manajemen SDM Internal																											
1780.EBC.Z13 Layanan Manajemen SDM	Orang	840	759	991	991	991	991	991																			
1780.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal																											
1780.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	3	1	2	2	2	2	2																			
1780.EBB.952 Layanan Prasarana Internal	Unit	2	-	-	1	1	1	1																			
Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri																											
SP.9 Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan																											
IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit	Ton	235.421.494	239.646.870	243.241.575	245.432.325	253.040.740	257.074.690																				
IKP 9.2 Produksi Kelapa	Ton	2.792.228	2.880.690	2.890.917	2.901.144	2.911.371	2.936.021																				
IKP 9.3 Produksi Sagu	Ton	393.284	393.623	413.304	433.969	455.667	478.451																				
IKP 9.4 Produksi Lada	Ton	58.897	64.408	64.408	64.537	64.601	64.666																				
IKP 9.5 Produksi Pala	Ton	39.558	41.527	41.568	41.610	41.652	41.693																				
IKP 9.6 Produksi Cengkeh	Ton	133.408	133.570	133.703	133.837	133.971	134.105																				
IKP 9.7 Produksi Vanili	Ton	1.212	1.582	1.585	1.585	1.587	1.588																				
IKP 9.8 Produksi Kopi	Ton	758.725	780.957	786.119	791.434	796.776	802.210																				
IKP 9.9 Produksi Tebu	Ton	33.216.612	36.813.539	39.555.979	42.478.762	60.450.243	84.714.460																				
IKP 9.10 Produksi Karet	Ton	2.132.088	2.496.364	2.470.676	2.756.865	2.917.026	3.080.114																				
IKP 9.11 Produksi Kakao	Ton	617.112	632.787	633.290	633.792	634.294	634.796																				
IKP 9.12 Produksi Teh	Ton	116.418	116.555	116.579	116.602	116.624	116.648																				
								2.965.943,67				5.870.456,27				3.269.565,94				2.160.616,68				2.183.179,09			



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 9.13	Produksi Jambu Mete	Ton	136.505	136.642	136.915	137.257	137.600	138.013					
IKP 9.14	Produksi Tanaman Palma Lainnya	Ton	186.765	188.236	189.899	192.270	194.173	195.953					
IKP 9.15	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ton	283.070	317.790	383.719	400.831	417.946	435.065					
SP.10	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi												
IKP.10.1	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Juta Ton	Indikator Baru	66,37	87,35	89,97	93,67	98,78					
SP 11	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun												
IKP 11.1	Indeks harga yang diterima Pekebun	Nilai	Indikator Baru	154,80	160,10	165,70	171,40	177,30					
SP 12	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan												
IKP 12.1	Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Nilai	Indikator Baru	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85					
SP 13	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan												
IKP 13.1	Volume ekspor komoditas perkebunan	ribu ton	38.034,00	38.224,00	38.415,00	38.607,00	38.800,00	38.994,00					
SP.14	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi												



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP.14.1	Nilai	Indikator Baru	1,30	1,50	1,80	2,00	2,20						
1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit Dan Aneka Palma													
SK.1													
Terpenuhinya produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma													
IKK1.1	Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha	1720	18,45	18,45	18,45	18,50						
IKK1.2	Produktivitas Kelapa	Ton/Ha	1,12	1,13	1,14	1,16	1,18	1,21					
IKK1.3	Produktivitas Sagu	Ton/Ha	3,01	3,12	3,14	3,16	3,18	3,19					
IKK1.4	Produktivitas Tanaman Palma Lainnya	Ton/Ha	3,50	3,53	3,54	3,55	3,56	3,58					
1777.AEA	Koordinasi												
1777.AEA.001	Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Kegiatan	7	8	-	20	20	20					
1777.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/ Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	NSPK	6	5	-	13	13	13					
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan												
1777.RAI.001	Kawasan Kelapa	Ha	11.260	11.515	154.000	64.275	15.000	15.000					
1777.RAI.002	Kawasan Sagu	Ha	551	1.700	3.350	3.350	3.350	3.350					
1777.RAI.003	Kawasan Pinang	Ha	100	-	-	300	300	300					



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1777CAI.001	Kawasan Tanaman Palma Lainnya	Ha	-	-	500	500	500	500					
	Kawasan Kelapa Sawit*)	Ha	-	25.500	36.000	46.500	52.000	57.000					
1777QDC	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
1777QDC.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Orang	-	-	3.800	4.600	5.200	6.000					
SK.2	Tersedianya komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi												
IKK 2.1	Persentase ketersediaan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi	%	Indikator Baru	28	36	37	37	38					
1777AEA	Koordinasi												
	Koordinasi, Bimtek, Pembinaan, Monev dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit untuk mendukung Bio Energi*)												
1777AEA.002	Kegiatan		-	1	1	1	1	1					
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Dan Tahunan												
SK.1	Terperuhnya produktivitas tanaman semusim dan tahunan												
IKK 1.1	Produktivitas Lada	Ton/Ha	0,62	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68					
IKK 1.2	Produktivitas Pala	Ton/Ha	0,38	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43					
IKK 1.3	Produktivitas Cengkeh	Ton/Ha	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40					
IKK 1.4	Produktivitas Vanili	Ton/Ha	0,31	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39					
IKK 1.5	Produktivitas Kopi	Ton/Ha	0,79	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82					
IKK 1.6	Produktivitas Kakao	Ton/Ha	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72					
1.811.291,96 1.721.379,76 1.970.829,86 1.868.696,68 1.884.908,80													

Ket *) : Anggaran diusulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 1.7	Produktivitas Tebu	Ton/Ha	63,78	69,98	73,42	75,82	83,50	87,40					
IKK 1.8	Produktivitas Karet	Ton/Ha	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95					
IKK 1.9	Produktivitas Teh	Ton/Ha	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62					
IKK 1.10	Produktivitas Jambu Mete	Ton/Ha	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53					
IKK 1.11	Produktivitas tanaman semusim dan tahunan lainnya	Ton/Ha	3,34	3,34	3,45	3,47	3,50	3,51					
5888.AEA	Koordinasi												
5888.AEA.001	Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan budidaya Tanaman Semusim dan Tahunan	Kegiatan	7	6	-	34	34	34					
5888.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/ Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	NSPK	11	16	-	15	15	15					
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan												
5888.RAI.001	Kawasan Lada	Ha	200	1.200	3.438	2.362	3.000	3.100					
5888.RAI.002	Kawasan Pala	Ha	1.000	8.000	14.800	22.200	9.000	9.000					
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	Ha	700	-	-	9.500	9.500	9.500					
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	Ha	4.700	100.453	99.547	24.000	24.000	24.000					
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	Ha	15	-	-	50	50	50					
5888.RAI.006	Kawasan Kopi	Ha	11.600	17.900	86.000	15.000	15.000	15.000					
5888.RAI.007	Kawasan Kakao	Ha	1.350	8.716	175.500	68.734	15.000	15.000					
5888.RAI.008	Kawasan Karet	Ha	1.200	-	-	15.000	15.000	15.000					
5888.RAI.009	Kawasan Jambu Mete	Ha	3.700	1.800	48.200	6.000	6.000	6.000					





Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
5888.RAI.010 Kawasan Teh	Ha	-	-	-	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950					
5888.CAI.001 Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Ha	-	-	1.350	1.450	1.450	1.450	1.550						
5888.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
5888.QDC.001 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan	Orang	-	-	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200						
1779 Pelindungan Perkebunan														
SK.1 Terlindunginya komoditas perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim										10.541,17	5.049,51	92.007,60	106.203,92	109.567,48
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa Sawit	%	71	75	75	76	76	76	76						
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa	%	31	35	35	36	36	36	36						
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Sagu	%	45	45	45	46	46	46	46						

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Lada	%	25	25	25	26	26	26						
IKSK 1.4													
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Pala	%	20	20	20	21	21	21						
IKSK 1.5													
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Cengkeh	%	40	40	40	41	41	41						
IKSK 1.6													
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Vanili	%	48	60	60	61	61	61						
IKSK 1.7													
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kopi	%	77	77	77	78	78	78						
IKSK 1.8													

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tebu	%	15	35	35	36	36	36							
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Karet	%	33	45	45	46	46	46							
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kakao	%	40	40	40	41	41	41							
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Teh	%	70	70	70	71	71	71							
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Jambu Mete	%	35	35	35	35	35	35							



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Palma Lainnya	%	19	19	19	20	20	20							
- Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/ wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	%	19	19	19	20	20	20							
1779.AEA	Koordinasi													
1779.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kegiatan	7	5	-	17	17	17	17						
1779.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/ Pedoman Pelindungan Perkebunan	7	7	-	7	7	7	7						
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan													
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Ha	81	-	22	400	400	400	400	400				
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	4.045	-	450	5.350	6.275	6.275	6.275					

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
1779.QDD.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Kelompok Masyarakat	51	23	4	23	23	23							
1779.QDD.002	Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Kelompok Masyarakat	-	-	13	210	260	257							
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	Unit	61	62	-	62	62	62							
SK.2	Terwujudnya layanan perlindungan perkebunan														
IKSK 2.1	Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK 2.2	Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK 2.3	Persentase layanan perlindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK 2.4	Persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100							
IKSK 2.5	Persentase layanan perlindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100							



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK 2.6 Persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.7 Persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.8 Persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.9 Persentase layanan perlindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.10 Persentase layanan perlindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.11 Persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Medan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.12 Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.13 Persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.14 Persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.15 Persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK 2.24 Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.25 Persentase layanan perlindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.26 Persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.27 Persentase layanan perlindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.28 Persentase layanan perlindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.29 Persentase layanan perlindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.30 Persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.31 Persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK 2.32 Persentase layanan perlindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.33 Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.34 Persentase layanan perlindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.35 Persentase layanan perlindungan komoditas Lada di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.36 Persentase layanan perlindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.37 Persentase layanan perlindungan komoditas Karet di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 2.38 Persentase layanan perlindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1779.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
1779.CAG.002 Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	Unit	13	6	-	18	21	23							
1779.BAA Pelayanan Publik Kepada Masyarakat														
1779.BAA.001 Layanan Proteksi Tanaman Perkebunan	Orang	-	-	26	73	82	92							

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)									
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan													1,026.539,83	3.664.272,45	972.806,31	54.305,70	55.448,64
SK.1 Tersedianya benih perkebunan berdasarkan kebutuhan produksi perkebunan																	
- Persentase ketersediaan benih kelapa sawit terhadap kebutuhan produksi kelapa sawit	%	Indikator Baru	80	80	85	85	90										
- Persentase ketersediaan benih kelapa terhadap kebutuhan produksi kelapa	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80										
- Persentase ketersediaan benih sagu terhadap kebutuhan produksi sagu	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70										
- Persentase ketersediaan benih lada terhadap kebutuhan produksi lada	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70										
- Persentase ketersediaan benih pala terhadap kebutuhan produksi pala	%	Indikator Baru	70	72	75	78	80										
- Persentase ketersediaan benih cengkeh terhadap kebutuhan produksi cengkeh	%	Indikator Baru	70	72	75	78	80										
- Persentase ketersediaan benih vanili terhadap kebutuhan produksi vanili	%	Indikator Baru	60	60	65	65	70										





Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
- Persentase ketersediaan benih kopi terhadap kebutuhan produksi kopi	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80	80					
- Persentase ketersediaan benih tebu terhadap kebutuhan produksi tebu	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80	80					
- Persentase ketersediaan benih karet terhadap kebutuhan produksi karet	%	Indikator Baru	60	60	65	65	65	70					
- Persentase ketersediaan benih kakao terhadap kebutuhan produksi kakao	%	Indikator Baru	75	75	80	80	80	80					
- Persentase ketersediaan benih teh terhadap kebutuhan produksi teh	%	Indikator Baru	60	60	65	65	65	70					
- Persentase ketersediaan benih jambu mete terhadap kebutuhan produksi jambu mete	%	Indikator Baru	60	60	65	65	65	70					
- Persentase ketersediaan benih tanaman palma lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman palma lainnya	%	Indikator Baru	60	60	65	65	65	70					
- Persentase ketersediaan benih semusim dan tahunan lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya	%	Indikator Baru	60	60	65	65	65	70					

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)							
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Rekomendasi	70,00	17	2	121	121	121	121						
5890.AEA	Koordinasi														
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Money, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	Kegiatan	7,00	1	-	30	35	35	40						
5890.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/ Pedoman Perbenihan Perkebunan	NSPK	6,00	6	-	10	10	10	10						
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
5890.RBK.001	Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan	Unit (ha)	12,00	1.580	6.638	21	13	10	10						
5890.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
5890.QDD.001	Desa Mandiri Benih Komoditas Perkebunan	Kelompok Masyarakat	-	-	2	6	6	6	6						
5890.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
5890.RDK.001	Layanan Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan	Unit (ha)	841,00	635	203	782	743	683	683						
5890.RDK.002	Layanan Operasional Nursery	Unit	11,00	78	8	9	9	9	9						
5890.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
5890.RAG.001	Benih Komoditas Perkebunan Siap Salur	Unit (Batang)	-	-	291.042.800	81.642.250	-	-	-						



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
- Persentase benih bermutu terhadap total benih cengkeh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	80	80	85	85	85	90					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	75	80	80	85	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	80	80	85	85	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih sagu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon	%	Indikator Baru	75	80	80	85	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih tebu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih kopi yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85	85					



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
- Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	80	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	80	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih jambu mete yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	80	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	80	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih lada yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	80	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih vanili yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	80	85	85					
- Persentase benih bermutu terhadap total benih teh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	80	85	85					



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
- Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman semusim lainnya yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya	%	Indikator Baru	80	80	80	85	85							
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk													
5890.BJA.001	Layanan Pengujian Mutu Benih	Produk (Batang)	12.589.740	5.527.084	12.589.740	12.589.740	12.589.740							
5890.BJA.002	Layanan Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	Produk (Batang)	61.659.600	50.334.580	61.659.600	61.659.600	61.659.600							
5890.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
5890.RDK.003	Layanan Operasional laboratorium pengujian perbenihan tanaman perkebunan	Unit	-	3	4	4	5							
5889. Hilirisasi Hasil Perkebunan								270.61,69	4.956,00	9.876,38	10.736,38	11.496,38		
SK:1	Tersedianya akses pasar komoditas perkebunan yang dapat dimanfaatkan usaha tani													
IKK 11	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani perkebunan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani perkebunan (%)	%	Indikator Baru	82	84	86	88	90						
5889.BMA	Data dan Informasi Publik													
5889.BMA.001	Informasi Pasar Komoditas Perkebunan	Dokumen	-	38	38	38	38							



Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.1	%	Indikator Baru	70	73	76	80	83						
5889.AEH	Promosi												
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	15	-	5	5	5	5	5					
SK.4	Meningkatnya komoditas perkebunan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing												
IKK 4.1	%	Indikator Baru	72	74	76	78	80						
5889.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
5889.QDD.003	Pembinaan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan	Kelompok Masyarakat	-	-	5	5	5	5					
5889.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/ Pedoman Hilirisasi Hasil Perkebunan	NSPK	8	14	14	14	14	14					
5889.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
5889.ABR.001	Kebijakan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan (Hilirisasi Bidang Perkebunan)	Rekomendasi kebijakan	-	-	12	10	10	10	10				

Sasaran Strategis (SS) Sasaran Program (SP)/Sasaran Kegiatan (SK)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
5889.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.RAG.001 Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	45	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.RAG.002 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	50	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.RBK.002 Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.PDA Standarisasi Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889.PDA.001 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	STDB	42.001	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN 2. MANAJEMEN RISIKO

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko					
1	1	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	3	Produksi Kelapa sawit	4	Dampak Perubahan iklim Serangan organisme pengganggu tumbuhan	5	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	6	<p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
			5	Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal		Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas				

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			Akses terhadap input produksi belum memenuhi standar teknis	Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian
			Degradasi dan konversi lahan	Alih fungsi pertanian	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan
2	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa	Dampak Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini 	Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
			Serangan organisme pengganggu tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli)



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pertakuan Risiko
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
			Degradasi dan konversi lahan	Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian
			Dampak Perubahan iklim	Alih fungsi pertanian	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan
3	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Sagu	Dampak Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini 	Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			Serangan organisme pengganggu tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
4	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Lada	<p>Degradasi dan konversi lahan</p> <p>Dampak Perubahan iklim</p> <p>Serangan organisme pengganggu tumbuhan</p> <p>Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal</p>	<p>Alih fungsi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT <p>Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
5	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Pala	<p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis</p> <p>Keterbatasan infrastruktur pertanian</p> <p>Degradasi dan konversi lahan</p> <p>Dampak Perubahan iklim</p> <p>Serangan organisme pengganggu tumbuhan</p>	<p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP</p> <p>Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian</p> <p>Alih fungsi pertanian</p> <p>Kenaikan suhu rata-rata</p> <p>Frekuensi cuaca ekstrem meningkat</p> <p>Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini</p> <p>Kelemahan dalam sistem deteksi dini</p> <p>Teknologi pengendalian OPT kurang tepat</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT</p>	<p>Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan</p> <p>Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP</p> <p>Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <p>Penguatan sistem deteksi dini</p> <p>Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli)</p>



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pelakuan Risiko
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
			Degradasi dan konversi lahan	Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian
			Dampak Perubahan iklim	Alih fungsi pertanian	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan
6	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Cengkeh	Dampak Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini 	Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			Serangan organisme pengganggu tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
				Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
7	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Vanili	<p>Degradasi dan konversi lahan</p> <p>Dampak Perubahan iklim</p> <p>Serangan organisme pengganggu tumbuhan</p>	<p>Alih fungsi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
			<p>Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal</p>	<p>Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas</p>	

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			<p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP</p> <p>Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian</p> <p>Alih fungsi pertanian</p>	<p>Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan</p> <p>Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP</p> <p>Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p>	
8	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kopi	<p>Dampak Perubahan iklim</p> <p>Serangan organisme pengganggu tumbuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli)



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pertakuan Risiko
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
				Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian
			Degradasi dan konversi lahan	Alih fungsi pertanian	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan
9	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Tebu	Dampak Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini 	Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			Serangan organisme pengganggu tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
				Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pertakuan Risiko
10	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Karet	<p>Degradasi dan konversi lahan</p> <p>Dampak Perubahan iklim</p> <p>Serangan organisme pengganggu tumbuhan</p> <p>Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal</p>	<p>Alih fungsi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini <ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb <ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
11	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kakao	<p>Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis</p> <p>Keterbatasan infrastruktur pertanian</p> <p>Degradasi dan konversi lahan</p> <p>Dampak Perubahan iklim</p> <p>Serangan organisme pengganggu tumbuhan</p>	<p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP</p> <p>Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian</p> <p>Alih fungsi pertanian</p>	<p>Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan</p> <p>Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP</p> <p>Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem deteksi dini • Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli)



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pertakuan Risiko
			<p>Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal</p> <p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP</p> <p>Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian</p> <p>Degradasi dan konversi lahan</p>	<p>Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP</p> <p>Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian</p> <p>Alih fungsi pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida <p>Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan</p> <p>Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP</p> <p>Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p>
12	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Teh	Dampak Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini 	

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			Serangan organisme pengganggu tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
				Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
13	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Jambu Mete	<p>Degradasi dan konversi lahan</p> <p>Dampak Perubahan iklim</p> <p>Serangan organisme pengganggu tumbuhan</p>	<p>Alih fungsi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
		<p>Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal</p>	<p>Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas</p>		

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
14	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Tanaman Palma Lainnya	<p>Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis</p> <p>Keterbatasan infrastruktur pertanian</p> <p>Degradasi dan konversi lahan</p>	<p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP</p> <p>Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian</p> <p>Alih fungsi pertanian</p>	<p>Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan</p> <p>Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP</p> <p>Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p> <p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem deteksi dini • Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli)



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pertakuan Risiko
			<p>Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal</p> <p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis</p> <p>Keterbatasan infrastruktur pertanian</p> <p>Degradasi dan konversi lahan</p>	<p>Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas</p> <p>Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP</p> <p>Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian</p> <p>Alih fungsi pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida <p>Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan</p> <p>Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP</p> <p>Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan</p>
15	Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya	Dampak Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suhu rata-rata Frekuensi cuaca ekstrem meningkat Kurangnya monitoring iklim berbasis sistem peringatan dini 	<p>Penguatan sistem peringatan dini (<i>Early Warning System</i>), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p>

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			Serangan organisme pengganggu tumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan dalam sistem deteksi dini Teknologi pengendalian OPT kurang tepat Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem deteksi dini Pengendalian OPT dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) (Budi Daya Tanaman Sehat, Pemanfaatan musuh alami, Pemantauan populasi hama secara rutin, dan Petani sebagai Ahli) Peningkatan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dsb
			Penggunaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dll) belum optimal	Ketersediaan input produksi berkualitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah kebun sumber benih sebar Persiapan kegiatan penyediaan benih minimal dilakukan T-1 Penambahan kuota pupuk dan pestisida
			Penggunaan input produksi belum memenuhi standar teknis	Akses terhadap input produksi berkualitas terbatas	Peningkatan akses pembiayaan KUR, Penguatan kelembagaan
			Keterbatasan infrastruktur pertanian	Terbatasnya pengetahuan petani terhadap penerapan GAP	Sosialisasi dan pembinaan petani dalam penerapan GAP
				Belum optimalnya pembangunan pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur pertanian	Koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait infrastruktur pertanian



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pertakuan Risiko
	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Degradasi dan konversi lahan	Alih fungsi pertanian	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan fungsi lahan
			Fluktuasi produksi TBS kelapa sawit berpotensi mengganggu kontinuitas pasokan bahan baku biodiesel	Anomali iklim, ketergantungan musim, variasi produktivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kalender tanam adaptif iklim Pemantauan iklim dan sistem peringatan dini Penguatan pengelolaan tata air kebun (drainase, embung, water management). Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan varietas toleran cekaman iklim.
			Serangan OPT	Pengendalian OPT belum terpadu dan adanya perubahan iklim meningkatkan risiko OPT	Penerapan pengendalian hama terpadu (PHT), penguatan layanan perlindungan tanaman
			Dinamika harga CPO berpotensi memengaruhi alokasi bahan baku untuk bioenergi	Fluktuasi harga global dan insentif bioenergi kurang kompetitif	Koordinasi kebijakan hulu-hilir dan penguatan insentif bahan baku bioenergi
	Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	Indeks harga yang diterima Pekebun	harga yang diterima pekebun rendah	Fluktuasi harga	pemantauan harga berkala
				Panjangnya rantai pasok	Kemitraan antara petani dengan pelaku usaha
				rendahnya kualitas produk	Pendampingan peningkatan mutu produk
				kurangnya informasi harga ke pekebun	Penguatan sistem informasi harga;

No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan	Adanya produk perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan mutu	Rendahnya penerapan Good Handling Practice (GHP) kepada petani/kelompok tani/pelaku usaha perkebunan/institusi terkait	Melakukan pengawasan dan pendampingan Good Handling Practice (GHP) kepada petani/kelompok tani/pelaku usaha perkebunan/institusi terkait
			Adanya penolakan ekspor produk perkebunan	Kurangnya pemahaman mengenai regulasi mutu dan keamanan pangan di negara tujuan	Melakukan pengawasan dan pendampingan regulasi kepada petani/kelompok tani/pelaku usaha perkebunan/institusi terkait
	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebuna	Volume ekspor komoditas perkebunan	Terbatasnya akses pasar pelaku usaha siap ekspor	terbatasnya jejaring pemasaran pelaku usaha hambatan perdagangan	Pendampingan peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha siap ekspor melakukan koordinasi antar kementerian yang menangani hal tersebut
	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan	Keterbatasan bahan baku untuk hilirisasi	Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan akibat tanaman tua dan rusak Ketidakseimbangan antara permintaan industri dan kapasitas produksi petani	Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait Program peremajaan tanaman komoditas perkebunan menggunakan benih unggul Membangun skema kemitraan antara industri hilir dan kelembagaan petani untuk menjamin penyerapan bahan baku Melakukan koordinasi lintas K/L terkait kebijakan tata niaga untuk mengarahkan lebih banyak bahan baku ke hilirisasi domestik



No	Jenis Konteks (sasaran program)	Nama Konteks (Indikator PK)	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko
			Keterbatasan teknologi pascapanen dan pengolahan	Tingginya biaya investasi terhadap peralatan pascapanen dan pengolahan	Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait pemberian bantuan peralatan pascapanen dan pengolahan secara bertahap di sentra unggulan
			Kurangnya pengetahuan SDM dalam menerapkan teknologi pascapanen dan pengolahan	Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan	Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan	Implementasi reformasi birokrasi yang tidak optimal	Kompetensi SDM belum memadai untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Standar pelayanan publik belum diterapkan konsisten	Peningkatan kompetensi teknis (perencanaan, penganggaran, SPIP, RB) Penerapan budaya kerja berintegritas dan pelayanan prima Monitoring dan evaluasi berkala dan dilakukan perbaikan tindak lanjut
				Tindak lanjut pengawasan kurang efektif	

LAMPIRAN 3: KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi (Non-Delegasi)	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL)	Untuk menjamin terlaksananya program ketahanan pangan nasional, serta ketersediaan bahan baku industri, dan perbaikan kesejahteraan petani tebu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Kementerian BUMN; 6. Perusahaan/ pabrik gula.	2005-2028
2.	Revisi Permentan No. 07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan	Penyederhanaan proses penilaian usaha perkebunan dan perlu mengatur mengenai lembaga pelatihan petugas penilai usaha perkebunan	Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan	1. Kementerian Investasi/ BKPM; 2. KPK; 3. Perusahaan Perkebunan kelapa sawit;	2026 – 2027: Pengharmonisan, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi
3.	Penggabungan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 138/ Permentan/ OT,140/12/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Nilam yang Baik 		Direktorat Jenderal Perkebunan	1. BRIN; 2. Lembaga Pengembangan dan Penelitian; 3. Perusahaan Perkebunan; Pekebun.	2026: Penyusunan dan pembahasan draft permentan. 2027-2028: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi



No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi (Non-Delegasi)	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/ Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Pedoman Teknis Budidaya Karet yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/ Permentan/ KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/ OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Teh yang Baik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/ Permentan/ OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi (Non-Delegasi)	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> Permentan Nomor 48/ Permentan/ OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik, menjadi 1 Peraturan Menteri Pertanian. 				
4.	Revisi Permentan No. 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	Untuk memastikan kualitas benih, mendukung pertumbuhan sektor perkebunan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko benih palsu atau tidak memenuhi standar.	Direktorat Perbenihan Perkebunan	1. BRIN; Lembaga Pengembangan dan Penelitian.	2025: Penyusunan dan pembahasan draft permentan. 2026-2027: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi
5.	Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa	Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kelapa, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. BRIN; 6. Perusahaan Perkebunan Kelapa; Pekebun Kelapa.	2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.



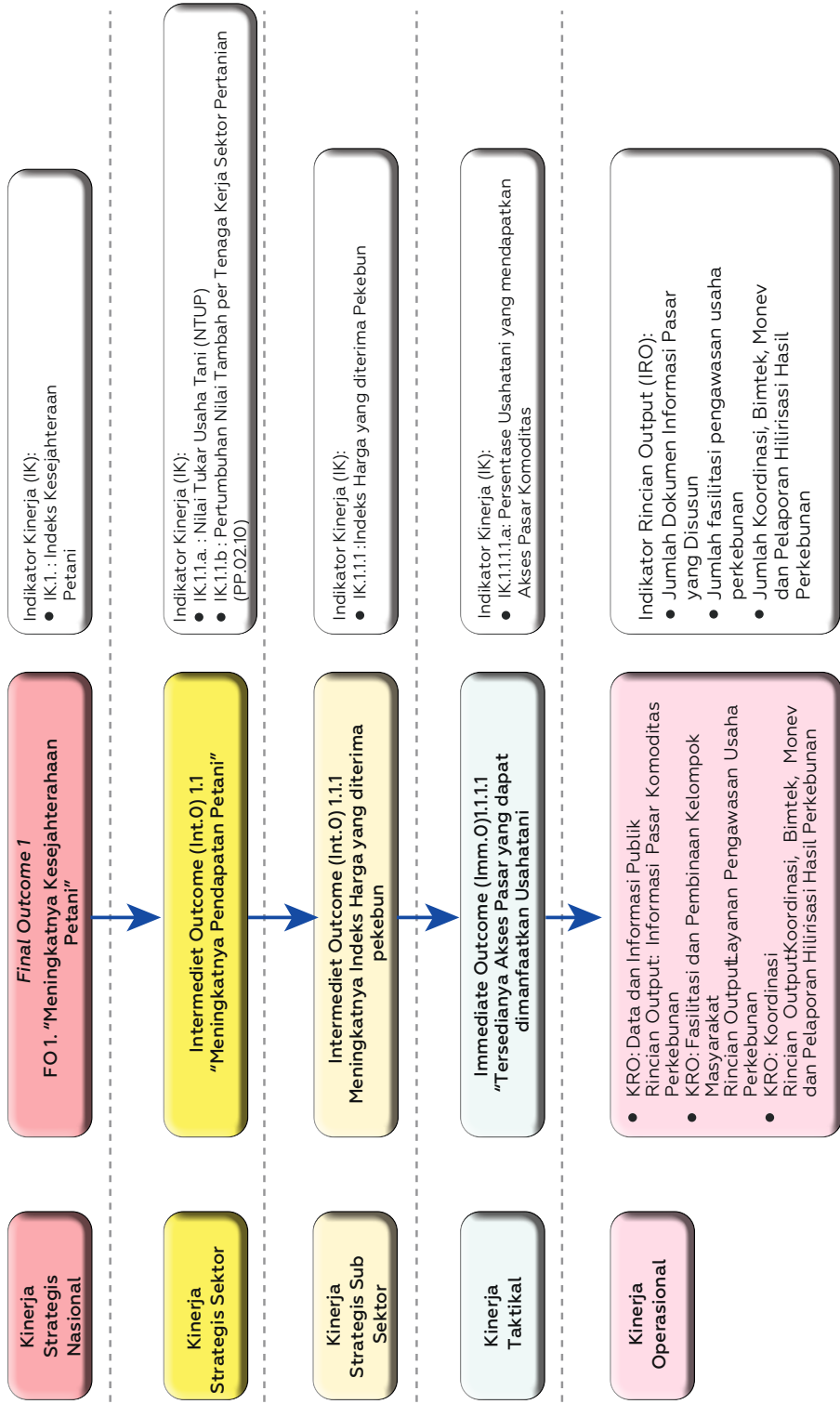
No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi (Non-Delegasi)	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6.	Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao	Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kakao, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.	Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kakao; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. BRIN; 6. Perusahaan Perkebunan kakao; Pekebun kakao.	2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.
7.	Revisi Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Untuk meningkatkan efektivitas ISPO dalam mendorong praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan, memenuhi standar internasional, dan mengatasi tantangan yang muncul di lapangan	Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan	1. Kementerian Pertanian; 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit; 3. Lembaga Sertifikasi ISPO; 4. Komite Akreditasi Nasional	2025 – 2026: Penyusunan, Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.
8.	Rancangan Permentan Tentang Kemitraan Pekebun Tebu dengan Pabrik Gula	Perlu dilakukan penataan terhadap hubungan antara petani tebu dengan pabrik gula melalui kemitraan untuk mendukung	Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian BUMN; 4. BRIN; 5. Perusahaan/ pabrik gula;	2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi

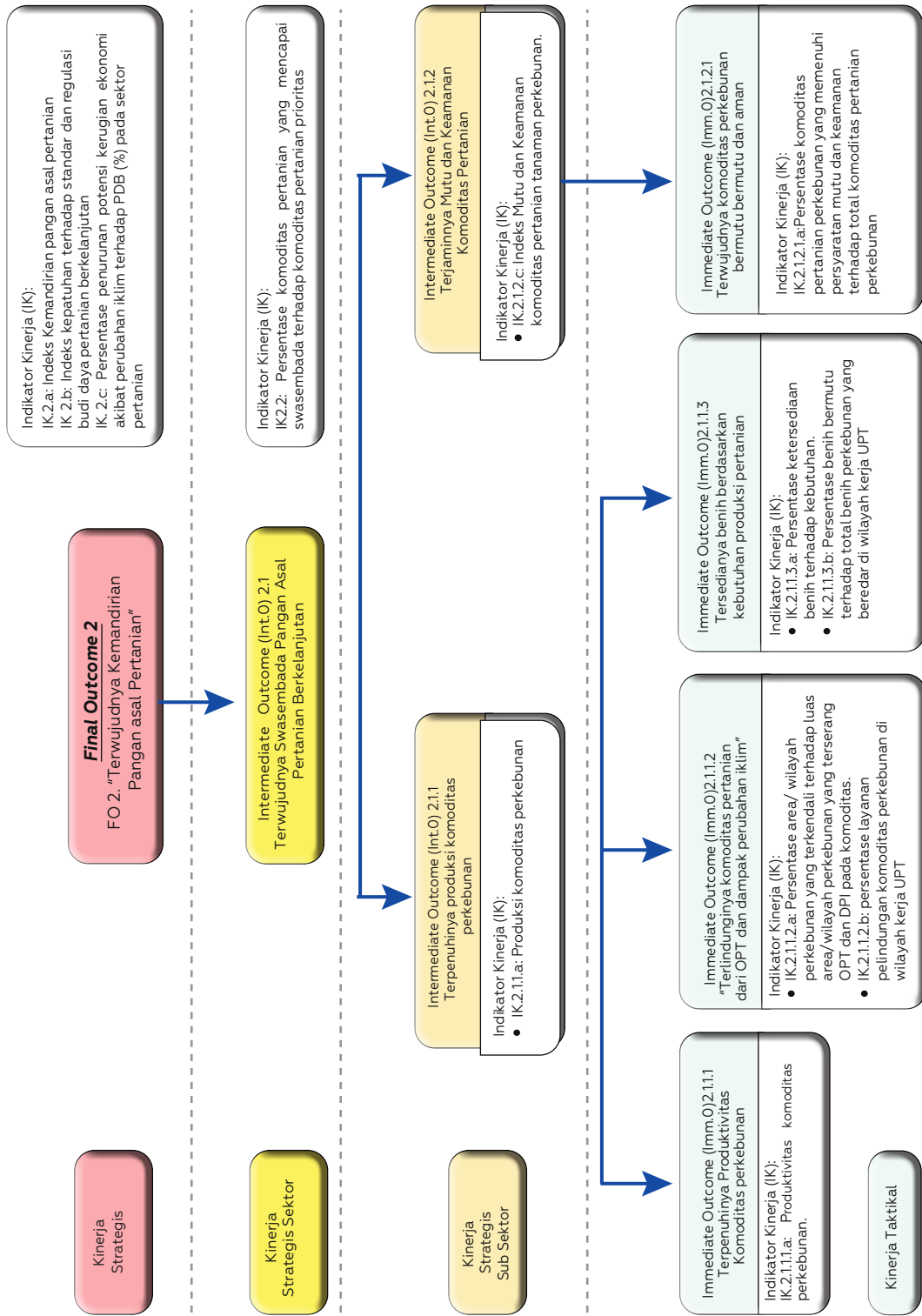
No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi (Non-Delegasi)	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		swasembada gula nasional dan penyediaan bahan baku bioethanol.		Petani Tebu.	
9.	Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peta Jalan Swasembada Gula Nasional	Kebutuhan konsumsi gula nasional meningkat setiap tahun, mendukung program swasembada gula nasional dan ketahanan pangan dan energi.	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian BUMN; 4. BRIN; 5. Perusahaan/ pabrik gula. 	<p>2026: Penyusunan, pembahasan, public hearing.</p> <p>2027: Harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi.</p>
10.	Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pelindungan Tanaman	Mengatur upaya perlindungan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam, untuk mendukung keberhasilan program pengembangan pangan dan hortikultura, menjaga produktivitas pertanian, serta meningkatkan kualitas hasil yang aman dikonsumsi dan memiliki daya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Perlindungan Perkebunan, • Dit. Perlindungan hortikultura, • Dit. Perlindungan Tanaman Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • BRIN • Barantin • Perguruan Tinggi • OPD • Petani • Asosiasi • Perusahaan swasta terkait pelindungan tanaman 	<p>2026: Penyusunan, pembahasan, public hearing.</p> <p>2027: Harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi</p>



LAMPIRAN 4. POHON KINERJA

POHON KINERJA FO.1





- **KRO:** Sarana Pengembangan Kawasan
- RO: Kawasan Komoditas Perkebunan
- **KRO:** Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
- RO: Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
- **KRO:** Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- RO: Peraturan/Norma/Pedoman
- **KRO:** Koordinasi
- RO: Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Money, dan Pelaporan Budidaya

- Indikator Rincian Output (IRO):**
- Luas Kawasan budidaya komoditas perkebunan
 - Jumlah Perkebun yang Mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
 - Jumlah NSPK
 - Jumlah Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Money, dan Pelaporan Budidaya

Kinerja Operasional

- **KRO:** Sarana Pengembangan Kawasan
- RO: Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
- **KRO:** Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
- RO: Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- **KRO:** Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- RO: Peraturan/Norma/Pedoman
- **KRO:** Koordinasi
- RO: Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Money, dan Pelaporan
- **KRO:** Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RO: Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- **KRO:** Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
- **KRO:** Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
- RO: Layanan Proteksi Tanaman Perkebunan

- Indikator Rincian Output (IRO):**
- Luas Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
 - Luas Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
 - Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
 - Jumlah Regu Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - Jumlah NSPK
 - Jumlah Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Money, dan Pelaporan Budidaya
 - Jumlah Peringkat perlindungan perkebunan
 - Jumlah Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
 - Jumlah orang mendapatkan layanan proteksi tanaman perkebunan

- **KRO:** Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- RO: Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
- **KRO:** Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- RO: Peraturan/Norma/Pedoman
- **KRO:** Koordinasi
- RO: Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Money, dan Pelaporan
- **KRO:** Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RO: Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan
- **KRO:** Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- RO: Desa Mandiri Benih Komoditas Perkebunan
- **KRO:** OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RO: Layanan Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan, Layanan Operasional Nursery
- **KRO:** Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RO: Benih Komoditas Perkebunan Siap Salur
- **KRO:** Penyidikan dan Pengujian Produk
- RO: Layanan Pengujian Mutu Benih, Layanan Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan
- **KRO:** OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RO: Layanan Operasional Laboratorium pengujian perbenihan tanaman perkebunan

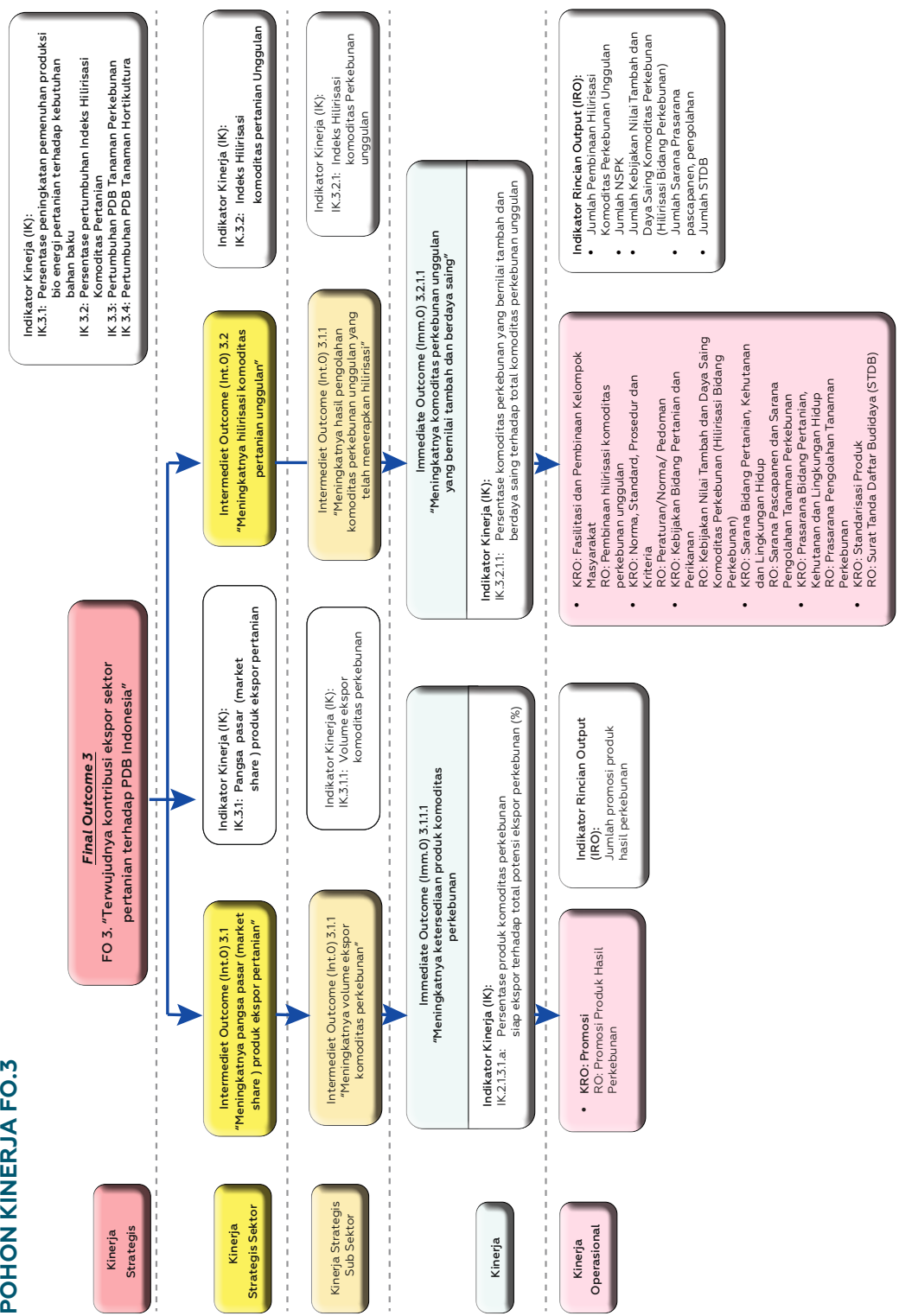
- Indikator Rincian Output (IRO):**
- Jumlah Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
 - Jumlah NSPK
 - Jumlah Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Money, dan Pelaporan
 - Jumlah Pembangunan Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan
 - Desa Mandiri Benih Komoditas Perkebunan
 - Luas Areal Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan
 - Jumlah Operasional Nursery
 - Benih Komoditas Perkebunan Siap Salur
 - Jumlah Benih Komoditas Perkebunan yang diawasi
 - Jumlah Benih Komoditas Perkebunan yang diuji
 - Operasional Laboratorium Pengujian Perbenihan Tanaman Perkebunan

- **KRO:** Pengawasan dan Pengendalian Produk
- RO: Pengawasan dan pengendalian Mutu dan keamanan produk perkebunan
- **KRO:** Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- RO: Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas Perkebunan kelompok masyarakat
- **KRO:** Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- RO: Peraturan/Norma/Pedoman
- **KRO:** Koordinasi
- RO: Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Money, dan Pelaporan Budidaya

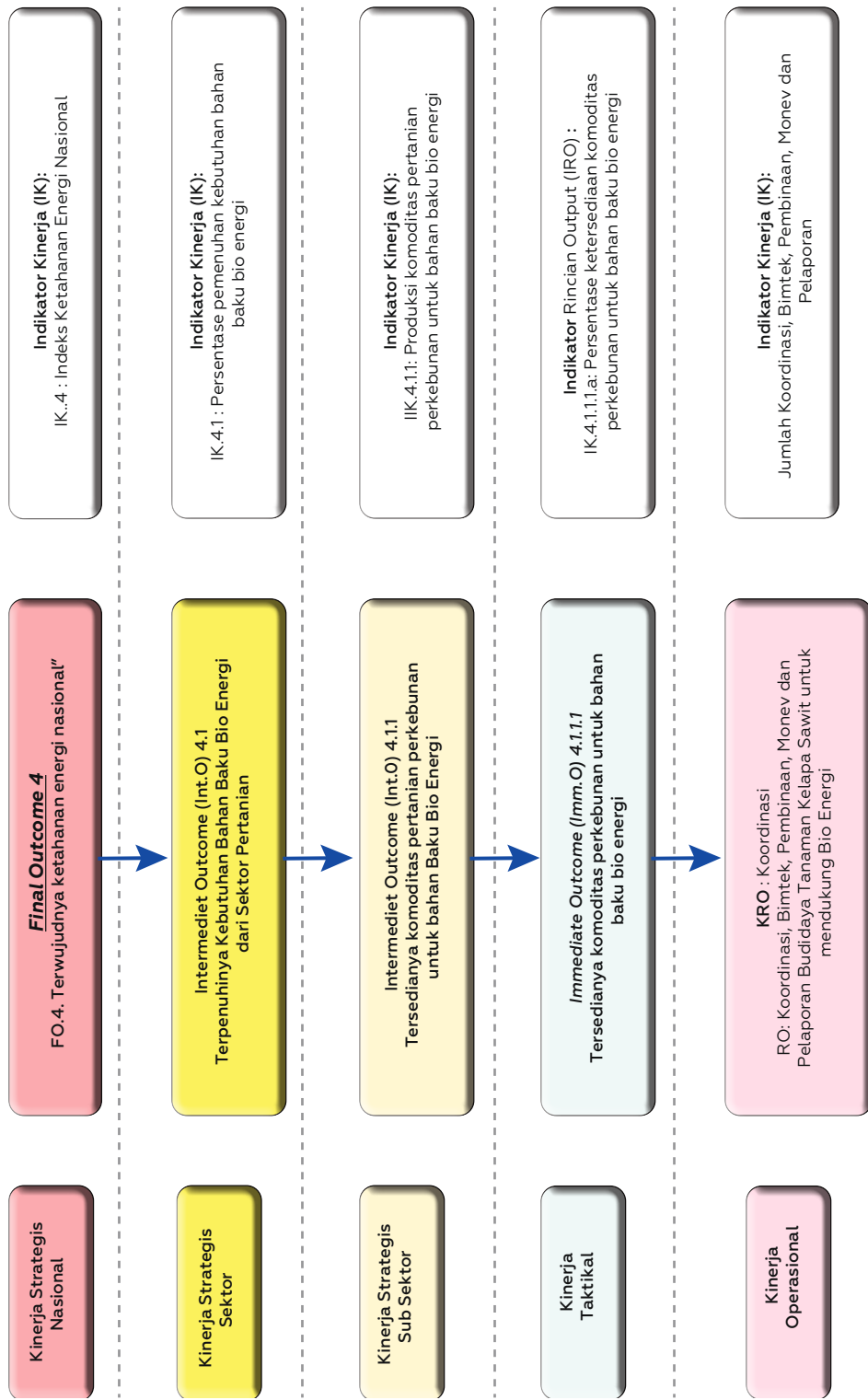
- Indikator Rincian Output (IRO):**
- Jumlah Pengawasan dan pengendalian Mutu dan keamanan produk perkebunan
 - Jumlah Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas Perkebunan kelompok masyarakat



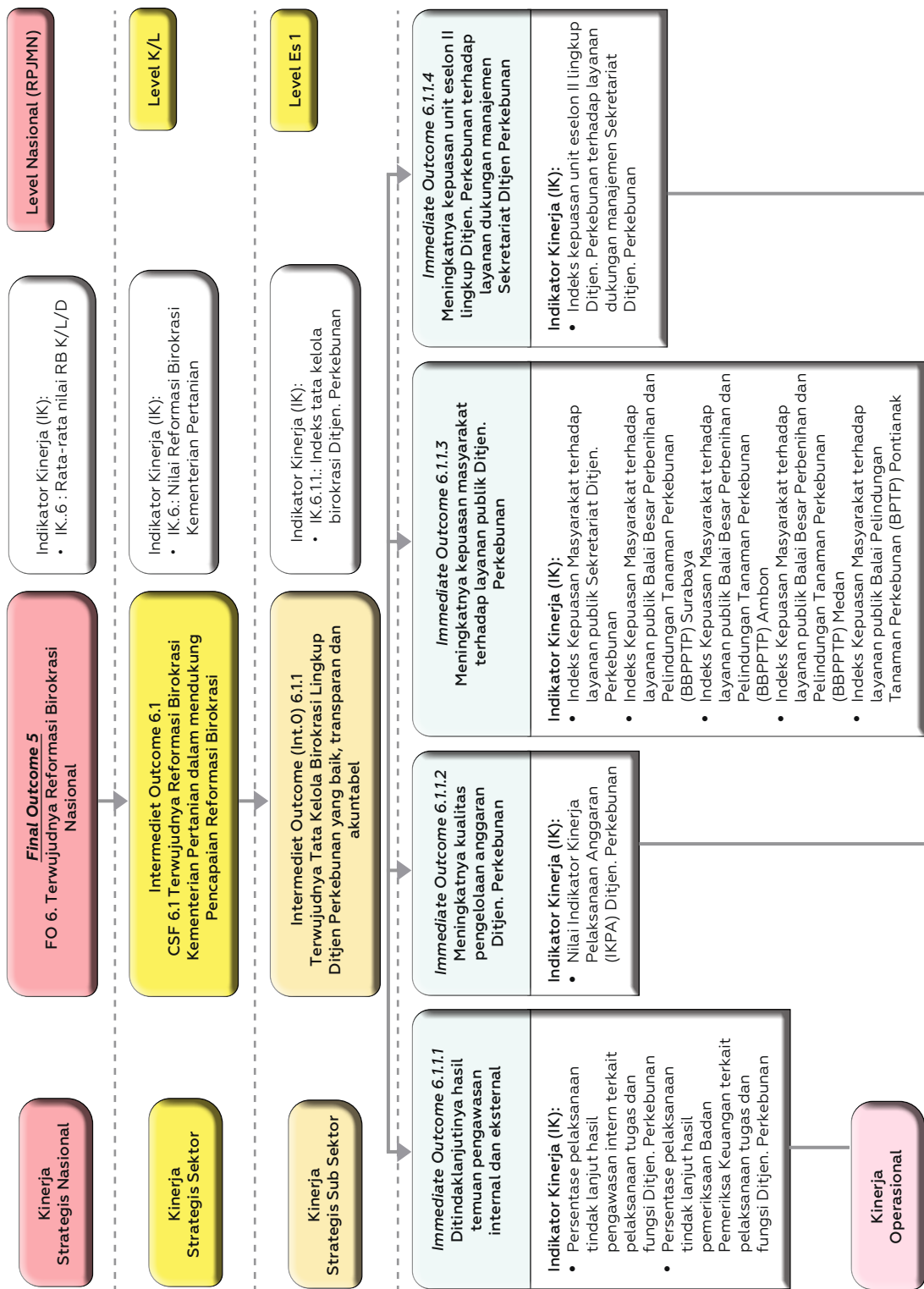
POHON KINERJA FO.3



POHON KINERJA FO.4



POHON KINERJA FO.5



- **KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**
RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat
- **KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal**
RO: Layanan BMN, Layanan BMN UPT Pusat

Indikator Output (IO):

- Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat
- Jumlah Layanan BMN, Jumlah Layanan BMN UPT Pusat

- **KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal**
RO: Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Data dan Informasi

Indikator Output (IO):

- Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Jumlah Layanan Manajemen Keuangan, Jumlah Layanan Manajemen Keuangan UPT Pusat

- **KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**
RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen Keuangan UPT Pusat

Indikator Output (IO):

- Jumlah Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Data dan Informasi

- **KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal**
RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan perkantoran, Layanan Umum
- **KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal**
RO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- **KRO: Layanan Manajemen SDM Internal**
RO: Layanan Manajemen SDM
- **KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal**
RO: Layanan Sarana Internal, Layanan Prasarana Internal

Indikator Output (IO):

- Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Jumlah Layanan perkantoran, Jumlah Layanan Umum
- Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
- Jumlah Layanan Sarana Internal, Jumlah Layanan Prasarana Internal



